



**PRAKARSA**  
Welfare Initiative for Better Societies

— A JOURNEY OF —  
**RESILIENT  
GROWTH**



**2023**

**Laporan Tahunan**

*Annual Report*



Silakan pindai QR Code di samping untuk  
mengunduh Laporan Tahunan ini.

Please scan the QR Code on the side to  
download this Annual Report.

# A Journey of Resilient Growth

Laporan Tahunan PRAKARSA 2023 | PRAKARSA Annual Report 2023

## Ringkasan Eksekutif Executive Summary

Selamat datang di laporan tahunan 2023 The PRAKARSA.  
Welcome to The PRAKARSA's 2023 annual report.

Sepanjang tahun 2023, pasca pandemi COVID-19, dunia kembali dihadapkan atas situasi krisis dimana tensi geo politik global meningkat akibat perang Rusia dan Ukraina. Bukan hanya itu, perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu penyebab permasalahan global seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Tahun 2023 menjadi tahun yang masih menjadi tantangan di seluruh dunia, karena harus menghadapi krisis ekonomi atau inflasi global akibat perang dan perubahan iklim. Dampak lainnya yang muncul akibat berbagai situasi global di atas yakni pelemahan rupiah dan beberapa mata uang asing terhadap dolar AS.

Pada tahun 2023, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara di kawasan ASEAN. Setelah menjadi tuan rumah pertemuan pemerintah negara-negara G20 tahun 2022, Indonesia memegang posisi Ketua ASEAN untuk tahun 2023. Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Latar belakang pemilihan tema tersebut tidak bisa dipisahkan dari tantangan dunia yang semakin kompleks. Dari tema inilah, Indonesia akan terus berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai, dan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara, pada momentum keketuaan ASEAN di Indonesia, The PRAKARSA aktif terlibat dalam advokasi isu-isu yang diusung oleh kelompok masyarakat sipil. Di mana isu-isu seperti jaminan sosial untuk tenaga kerja migran dan pengembangan bisnis inklusif menjadi

Throughout 2023, after the COVID-19 pandemic, the world again faced a crisis where global geopolitical tensions increase due to the war between Russia and Ukraine. Not only that, but climate change continues to exacerbate global issues, such as economic growth, social welfare and social stability. 2023 remains a year of challenges worldwide, as we confront financial crisis or global inflation stemming from war and climate change. Another consequence of these global circumstances is the weakening of the rupiah and several foreign currencies against the US dollar.

In 2023, Indonesia once again hosted a meeting of countries in the ASEAN region. After hosting the government meeting of G20 countries in 2022, Indonesia assumed the Chair of ASEAN for 2023. This year, Indonesia's Chairmanship in ASEAN is themed "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". The choice of this theme must be distinct given the challenges of an increasingly complex world. Through this theme, Indonesia aims to further strengthen ASEAN's position as a stable and peaceful region with sustainable economic growth.

Meanwhile, during ASEAN's chairmanship in Indonesia, The PRAKARSA actively advocated for issues promoted by civil society groups. Social security for migrant workers and inclusive business development are of primary concern. The PRAKARSA's involvement at the global and regional levels is also balanced with our active participation at the national level. This includes preparation for the preparation for the Long-Term Development Plan (RPJP) 2025-2045 and the



perhatian utama. Keterlibatan The PRAKARSA di level global dan regional juga diimbangi dengan keterlibatan aktif kami di tingkat nasional, salah satunya dalam persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dorongan kuat juga diberikan untuk memperjelas pencapaian dan pengukuran capaian isu-isu Sustainable Development Goals (SDGs) dan pembangunan inklusif pada tingkat lokal, terutama di pemerintahan daerah.

Dinamika lainnya yang ada di tingkat nasional yakni fokus pada persiapan Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 di semua aspek, termasuk penyelenggaraan, pengawasan, dan partisipasi. Di samping itu, terdapat tren pendanaan donor yang mengarah ke isu ekonomi hijau/perubahan iklim, serta tren pendanaan riset dari donor luar negeri menggunakan model konsultasi individual, termasuk model hibah riset untuk perguruan tinggi. Tantangan ini juga menjadi hal yang harus dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil termasuk The PRAKARSA.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung transparansi dan tata kelola yang baik. Kami menyajikan laporan tahunan yang memuat profil, capaian kerja, sumber daya manusia, dan capaian keuangan selama tahun 2023. Pernyataan atas capaian dalam laporan tahunan ini kami susun berdasarkan fakta berbasis bukti atas kondisi yang telah terlaksana selama 2023.

Laporan tahunan The PRAKARSA 2023 menggambarkan dinamika proses perjalanan organisasi dan program-program. Pada tahun 2023, kami mengangkat tema "A Journey of Resilient Growth" setelah pada tahun sebelumnya kami mengangkat tema "Thriving in Challenging Time". Tema tahun 2023 dipilih karena menggambarkan perjalanan The PRAKARSA dalam bertahan dan tumbuh. Ini menegaskan bahwa pencapaian organisasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan dan penuh perjuangan. Frasa "A Journey of Resilient Growth" menekankan bahwa perjuangan belum berakhir, tetapi kami terus bergerak maju meskipun banyak kesulitan yang dihadapi. Ini menunjukkan semangat dan tekad kami untuk terus berjuang demi mencapai tujuan.

National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2025-2029. Strong encouragement is also given to clarify the achievement and measurement of the accomplishments of Sustainable Development Goals (SDGs) and inclusive development issues at the local level, especially in regional Government.

Another dynamic at the national level is the focus on preparations for the 2024 Presidential General Election in all aspects, including implementation, supervision and participation. Additionally, there is a trend in donor funding towards green economy/climate change issues and research funding from foreign donors using individual consultancy models, including research grant models for universities. This challenge is also something that civil society groups, including The PRAKARSA, must face.

As part of our commitment to supporting transparency and good governance, we present an annual report containing the profile, work achievements, human resources, and financial achievements for 2023. We have prepared statements of the accomplishments in this annual report based on evidence-based facts regarding the conditions implemented during 2023.

The PRAKARSA 2023 annual report describes the dynamics of the organisation's journey and programs. In 2023, we chose the theme "A Journey of Resilient Growth" after previously selecting "Thriving in Challenging Times". The PRAKARSA selected 2023 theme to illustrate its journey in surviving and growing. This emphasises that organisational achievements do not occur instantly but through continuous struggle. The phrase "A Journey of Resilient Growth" stresses that the battle is not over, but we continue to move forward despite the many difficulties. This demonstrates our passion and determination to continue fighting to achieve our goals.



# Daftar Isi

## Table of Contents

<b>Ringkasan Eksekutif</b> Executive Summary	2
<b>Daftar Isi</b> Table of Contents	4
<b>Laporan Direktur Eksekutif PRAKARSA</b> Report from the Executive Director of The PRAKARSA	6



<b>01</b> <b>Pendahuluan</b> Introduction	10
<b>1. Sejarah PRAKARSA</b> History of The PRAKARSA	12
<b>2. Sekilas PRAKARSA</b> Overview of The PRAKARSA	14
<b>3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Kami</b> Our Vision, Mission and Values	16
<b>4. Budaya Organisasi</b> Organisational Culture	17
<b>5. Struktur dan Tata Kelola The PRAKARSA</b> The PRAKARSA Structure and Governance	21
<b>6. Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> Human Resources Development	34

<b>02</b> <b>Capaian Utama</b> Highlights of Achievements	38
<b>1. Mengembangkan jejaring antar think-tank, OMS dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan</b>	40
Develop networks between think tanks, CSOs and the private sector in initiating policy reform	
<b>2. Produk-produk Pengetahuan yang Dihasilkan</b>	42
The Knowledge Products Produced	
<b>3. The PRAKARSA dalam Kebijakan Publik Indonesia</b>	56
The PRAKARSA in Indonesian Public Policy	
<b>4. Pengembangan unit bisnis</b>	60
Business unit development	
<b>5. Kerja sama multi pihak</b>	62
Multi-party collaboration	

## 03

### Transparansi dan Akuntabilitas Transparency and Accountability 66

1. Ringkasan kinerja keuangan The PRAKARSA 68  
Summary of The PRAKARSA's financial performance
2. Hasil audit 69  
Audit results
3. Kepatuhan dengan regulasi dan standar yang relevan 72  
Compliance with relevant regulations and standards

## 04

### Rencana dan Inisiatif Tahun 2024 74 Plans and Initiatives for 2024

## 05

### Media Engagement dan Public Relations 80 Media Engagement and Public Relations

1. Unduhan dan kutipan 82  
Downloads and quotes
2. Kampanye Sosial Media 85  
Social Media Campaign

## 06

### Penutup 86 Closing

1. Ringkasan pencapaian utama 88  
Summary of key achievements
2. Tantangan 89  
Challenge



# Laporan Direktur Eksekutif PRAKARSA

Report from the Executive Director of The PRAKARSA



“

Bagi PRAKARSA, tahun 2023 adalah tahun resiliensi. Tiga tahun hidup di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara yang mudah. Dengan dukungan parapihak dan tingginya komitmen tim PRAKARSA, kami dapat bertahan, pulih, kontributif dan terus tumbuh sebagai organisasi riset dan advokasi kebijakan. Keberhasilan ini membawa kami makin optimistis untuk perluasan area kerja, tidak saja bekerja di level domestik, namun di level regional dan global.

For the PRAKARSA, 2023 is a year of resilience. Three years of living in the midst of the Covid-19 pandemic is not an easy matter. With the support of various parties and the high commitment of the PRAKARSA team, we can resilient, recover, contribute and continue to grow as a research and policy advocacy organization. This success makes us more optimistic about expanding our work area, not only working at the domestic level, but at the regional and global levels.

**Ah Maftuchan**

*Executive Director of The PRAKARSA*



PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta pelibatan para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sesama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun sektor swasta agar dapat berkontribusi secara efektif dalam perwujudan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Contoh kolaborasi penelitian antara lain: riset kolaboratif di tingkat regional, di mana PRAKARSA memimpin riset Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia di Filipina dan Vietnam, bersama Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS) di Vietnam dan Third World Network (TWN) di Filipina. Kami juga melakukan pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief kepada para akademisi, pemerintah daerah dan OMS bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia.

Kami terus berkolaborasi dengan OMS agar peran dan kontribusi OMS dalam penguatan reformasi kebijakan terwujud dengan partisipasi yang bermakna. Kami aktif dalam upaya-upaya melakukan review dan masukan bagi aturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi teknis yang sudah ada maupun yang perlu disusun oleh pembuat kebijakan. Di tingkat nasional, kami aktif bersama Koalisi Responsibank Indonesia dalam memantau dan memberikan masukan secara lisan dan tertulis terkait integrasi taksonomi untuk implementasi Comprehensive Investment Plan Just Energy Transition Partnership. Kami juga mengawal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan atau compliance risk management (CRM), sebagai respon atas usulan pajak kekayaan. Selain itu, di isu kelanjutusiaan Pemerintah Jawa Barat meminta tim Prakarsa menulis Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur tentang Kelanjutusiaan. Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta tim Prakarsa menulis naskah

The PRAKARSA employees a comprehensive approach combining research, capacity building, and stakeholder engagement, including the central Government, regional Government, fellow CSOs, and the private sector, to effectively realise socio-economic justice and community welfare in Indonesia. An examples of research collaboration includes a joint effort at the regional level, where The PRAKARSA led research on Tax System Asymmetry and Potential Wealth Tax Revenue in Indonesia, the Philippines and Vietnam, together with Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS) Vietnam and Third World Network (TWN) in the Philippines. Furthermore, we conduct policy analysis and policy brief writing training for academics, local governments and CSOs in collaboration with the Institute for Socio-Political Research and Development (LPPSP) FISIP, University of Indonesia.

We maintain collaborative efforts with civil society organisations (CSOs) to ensure their role and contribution in strengthening policy reform realized with meaningful participation. Our activities include reviewing and providing input on existing laws and technical regulations, as well as those that policymakers are drafting. At the national level, we are actively engaged with the Indonesian Responsibank Coalition in monitoring and providing verbal and written input regarding taxonomy integration for implementing the Comprehensive Investment Plan Just Energy Transition Partnership. Additionally, we oversee the Directorate General of Taxes (DGT) in establishing a taxpayer compliance committee to oversee compliance risk management (CRM) in response to the proposed wealth tax. Moreover, we were requested by the West Java Government to draft Academic Manuscripts and Governor Regulations on Aging. Similarly, the DKI Jakarta Provincial Government sought assistance from The PRAKARSA team to draft an academic manuscript for DKI Jakarta Social Assistance and to incorporate Multidimensional Poverty as an

akademik Bantuan Sosial (bansos) DKI Jakarta dan mengadopsi Kemiskinan Multidimensi sebagai indikator yang harus diukur dalam bansos.

Kapasitas PRAKARSA bekerja di tingkat nasional, regional dan internasional meningkat. Ini dapat dilihat dari kepemimpinan PRAKARSA dalam GATJ (Global Alliance for Tax Justice), TAFJA (Tax and Fiscal Justice Asia), C20, dan ASEAN Chairmanship. Keterlibatan kami di C20 berlanjut hingga C20 di India 2023 yakni: (i) menjadi Troika Presidensi C20 India, (ii) sebagai International Advisory Committee C20 India; (iii) mengkoordinir workshop Policy Pack formulation Disability, Equity, and Justice Working Group, C20 India; (iv) berkolaborasi dengan OHANA dalam international workshop: Enabling the Provision of Assistive Device and Technology in the Global South: Barriers and Realistic Action Plans – side event C20 India. Selanjutnya, (i) PRAKARSA memperkuat isu-isu perlindungan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan inklusif bisnis pada side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 42 di Indonesia; dan (ii) PRAKARSA masih menjadi Coordinating Committee of GATJ dan Co-coordinator TAFJA.

Secara internal, keberhasilan pada 2023 antara lain (i) berhasil menjalankan peningkatan kapasitas staf, baik melalui kursus tematik maupun jenjang program (doktoral dan magister), (ii) berhasil mengembangkan media publikasi melalui website dan sosial media.

2023 merupakan tahun peningkatan kapasitas organisasi secara internal sebagai landasan menjaga keberlanjutan organisasi. Ini dapat dilihat dari: (i) pengembangan unit bisnis; (ii) pengembangan sumber daya untuk meningkatkan branding lembaga sebagai think-tank di level nasional/regional/global dan jejaring; (iii) pengembangan sumber daya untuk penguatan institusi seperti penguatan kebijakan internal, prosedur dan dokumen strategis.

Secara khusus, saya sebagai Direktur Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengurus, manajemen, staf, associate, penasihat, mitra kerja, donor (Ford Foundation, Oxfam Novib, Oxfam Regional Asia, Rainforest Action Network, KONEKSI-DFAT, LCDI-FCDO/OPML), Kementerian/Lembaga, DPR, OMS, jurnalis dan publik secara luas atas dukungan terhadap kerja-kerja PRAKARSA.

indicator that must be measured in social assistance programs.

PRAKARSA's capacity to work at national, regional and international levels has increased. This is evident from PRAKARSA's leadership roles in organizations such as GATJ (Global Alliance for Tax Justice), TAFJA (Tax and Fiscal Justice Asia), C20, and during Indonesia's ASEAN Chairmanship. Our involvement in C20 continued until C20 in India 2023, where we held several key positions and organized various events: (i) Serving as Troika Presidency of C20 India, (ii) Acting as the International Advisory Committee of C20 India; (iii) coordinating the Policy Pack formulation workshop on Disability, Equity, and Justice Working Group, C20 India; (iv) collaborating with OHANA in the international workshop: Enabling the Provision of Assistive Device and Technology in the Global South: Barriers and Realistic Action Plans – C20 India side event. Furthermore, (i) PRAKARSA strengthens issues of labour protection, poverty alleviation and business inclusion at the side event of the 42nd ASEAN High-Level Conference (KTT) in Indonesia; and (ii) PRAKARSA continues to serve as the Coordinating Committee of GATJ and Co-coordinator of TAFJA.

Internally, successes in 2023 include (i) successfully increasing staff through capacity through thematic courses and degree programs (doctoral and master's) and (ii) successfully developing publication media via websites and social media.

In 2023, the focus was on increasing organisational capacity internally to ensure sustainability. This was evidenced through (i) business unit development, (ii) the enhancement of resources to elevate the institution's branding as a think-tank at national, regional, global and networking levels, (iii) the reinforcement of resources for institutional strengthening such as internal policies, procedures and strategic documents.

In particular, as the Executive Director, I would like to express my gratitude to the Governing Body, management, staff, associates, advisors, working partners, including donors (Ford Foundation, Oxfam Novib, Oxfam Regional Asia, Rainforest Action Network, KONEKSI-DFAT, LCDI-FCDO/OPML), Ministries/ Agencies, DPR, CSOs, journalists and the public at large for their support for PRAKARSA's work.

Laporan Tahunan 2023 adalah cara kami menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Di sini kami menyajikan berbagai ringkasan atas kegiatan dan capaian serta ringkasan keuangan PRAKARSA sepanjang tahun 2023. Kami berharap laporan ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders kepada PRAKARSA.

PRAKARSA berkomitmen untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kami berharap para pihak dapat terus mendukung kami. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami selama ini.

Rawa Bambu, Jakarta Selatan, Maret 2024  
Rawa Bambu, South Jakarta, March 2024



**Ah Maftuchan**  
Direktur Eksekutif The PRAKARSA  
Executive Director of The PRAKARSA

The 2023 Annual Report serves as our way to transparency and public accountability. Within its pages, we provide comprehensive summaries of PRAKARSA's activities, achievements, and a financial summary for 2023. It is our inspiration that this report increased trust among our stakeholder.

The PRAKARSA remains steadfast in its dedication to fostering a more just and prosperous society. We extend our sincere gratitude to all those who have supported us thus far, and we hope for continued support from all parties. Thank you.





# Pendahuluan

## Introduction

**Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi.**

The organisation and its staff are committed to carrying out work, making decisions, establishing policies fairly, and prioritising efforts to enhance the welfare of all employees.



**PRAKARSA**  
Welfare Initiative for Better Societies



## » 1. Sejarah PRAKARSA History of The PRAKARSA



**PRAKARSA memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**

**The PRAKARSA is mandated to contribute to the development of a democratic, just, and prosperous society by generating knowledge and disseminating innovative ideas in the field of welfare, alongside advocating for alternative development to achieve socio-economic justice and social welfare.**

PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan non-profit dan non-pemerintah, dengan bentuk legal perkumpulan, yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 2004 di Jakarta melalui Akte Notaris Publik Nurul Larasati, SH Nomor 03 Tanggal 31 Agustus 2004 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005. Nama resmi PRAKARSA adalah "Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif" atau "Initiative for Welfare State and Alternative Development" yang disingkat dengan PRAKARSA.

Pada awal berdirinya, PRAKARSA menempatkan diri sebagai salah satu sistem pendukung untuk pengembangan ide dan inovasi di kalangan masyarakat sipil dan gerakan sosial di Indonesia melalui peningkatan kapasitas, keahlian dan keterampilan tingkat lanjut bagi masyarakat sipil terutama

The PRAKARSA is a non-profit and non-governmental policy research and advocacy institution, legally constituted as an association. It was established on August 31, 2004, in Jakarta, as evidenced by Public Notary Deed of Nurul Larasati, SH Number 03 dated August 31, 2004, and further formalized by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005. The official name of PRAKARSA is "Community Initiative for an Alternative Welfare State and Development" or "Initiative for Welfare State and Alternative Development", abbreviated as PRAKARSA.

From its inception, The PRAKARSA positioned itself as a vital support system for nurturing ideas and fostering innovation with civil society and social movements in Indonesia. This was achieved through enhancing capacity, expertise and advanced skills





dalam aspek kebijakan dan kelembagaan. Ini sesuai dengan konteks Indonesia pada dekade awal Reformasi dimana Indonesia baru saja memasuki era demokrasi yang vibran dan terlepas dari pemerintahan otoriter sebelumnya, sehingga penting untuk mengisi era Reformasi dengan analisis dan rekomendasi kebijakan dari kalangan masyarakat sipil, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam alam demokrasi.

Pada perkembangannya, isu kebijakan dan konteks sosial ekonomi yang dialami Indonesia semakin berkembang, sehingga melalui berbagai perencanaan strategis lembaga, fokus PRAKARSA tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan isu negara kesejahteraan dalam arti sempit, namun berkembang pada isu-isu yang semakin relevan bagi Indonesia (dan dunia).

for civil society, particularly in policy and institutional aspects. This mission was particularly crucial in the early decades of the Reformation period, marked by the transition to a vibrant democratic era following separation from the previous authoritarian Government. It was imperative to fill the Reformation era with analysis and policy recommendations from civil society, thereby actively participating in the democratic process.

As Indonesia's policy landscape and socio-economic context continue to evolve, PRAKARSA's strategic planning has expanded beyond merely enhancing civil society capacity and addressing welfare state issues narrowly defined. The Prakarsa's focus has grown towards addressing a broader range of issues that are increasingly relevant not only to Indonesia but also to the global community.

**Pada pertengahan dekade kedua tahun 2000-an, fokus isu PRAKARSA mengerucut pada tiga isu kebijakan utama:**

By the mid-2000s, PRAKARSA had identified three main policy areas as central to its mission:



\*sebagai isu cross-cutting.

These issues are interconnected and serve as focal points for PRAKARSA's efforts to address pressing challenges and contribute to societal well-being.

## » 2. Sekilas PRAKARSA Overview of The PRAKARSA



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

### Welfare Initiatives for Better Societies

Lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, “think and do tank”, berbasis organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Indonesia, yang berdiri pada 31 Agustus 2004 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005.

A research and policy advocacy institute, a “think and do tank”, based on civil society organisations in Jakarta, Indonesia. It was established on August 31, 2004, and ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.C-21.HT.01.03.TH.2005.

### The PRAKARSA

#### (PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif)

(Community Initiative for an Alternative Welfare and Development State)

Memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.

Has a mandate to contribute to the development of a democratic, just and prosper society through the production of knowledge and dissemination of innovative ideas in the field of welfare and alternative development for the realisation of socio-economic justice and social welfare. PRAKARSA focuses on social policy issues, fiscal policy, and sustainable development.

Memilih untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan dan penguatan perumusan kebijakan publik berbasis bukti dengan pendekatan multi-pihak bersama aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah. Area kerja PRAKARSA di tingkat lokal, nasional, dan global.

Chooses to be actively involved in policy advocacy and strengthening evidence-based public policy formulation with a multi-stakeholder approach with government and non-government actors. The PRAKARSA work areas span at local, national, and global levels.





The PRAKARSA didukung oleh peneliti, praktisi, intelektual, dan pembuat kebijakan yang memiliki reputasi dalam produksi pengetahuan dan analisis kebijakan yang inovatif, solid, dan berbasis bukti.

The PRAKARSA is supported by researchers, practitioners, intellectuals, and policy makers who have a reputation for producing innovative, solid, and evidence-based knowledge and policy analysis.

The PRAKARSA bergerak pada ranah “knowledge generating”, “engagement”, dan “problem solving” agar pengetahuan berkembang menjadi sebuah tindakan kebijakan.

The PRAKARSA operates in the realm of “knowledge generating”, “engagement”, and “problem solving” so that knowledge develops into policy action.

The PRAKARSA didukung oleh donor dan mitra pembangunan yang menghargai independensi analisis dan kerja-kerja kami.

The PRAKARSA receives support from donors and development partners who respect the independence of its analysis and work.



### » 3. **Visi, Misi dan Nilai-nilai Kami** Our Vision, Mission and Values



#### **Visi** Vision

Menjadi Lembaga riset dan pengembangan kapasitas yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

To become a research and capacity development institution capable of pioneering the emergence of innovative and transformative ideas to realise socio-economic justice and prosperity.

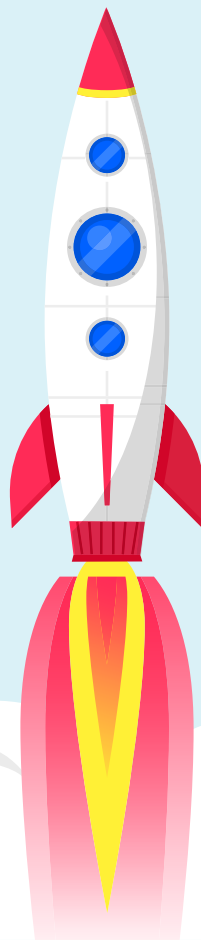
#### **Misi** Mission

Memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan dan praktik kebijakan kesejahteraan

Producing and promoting welfare policy discourse, knowledge and practice

Melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Carrying out research and studies in the fields of social policy, fiscal policy and sustainable development policy



Menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan

Organising capacity development, education and training for stakeholders

Mengembangkan jejaring antar think-tank, OMS dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan

Developing networks between think tanks, CSOs and the private sector in initiating policy reforms

## » 4. Budaya Organisasi Organisational Culture



### 1. Keadilan dan Kesejahteraan Justice and Welfare

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi. Sistem yang ditetapkan dalam organisasi akan memastikan terjadinya pendekatan yang objektif, adil, dan akuntabel dalam mengupayakan kesejahteraan staf. Pemenuhan hak asasi manusia dan hak pekerja dijunjung dalam organisasi dalam relasi organisasi dengan karyawan dan mitra organisasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan merupakan hal yang mendasar untuk produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

The organisation and its staff are committed to carrying out work, making decisions, establishing policies fairly, and prioritising efforts to enhance the welfare of all employees. The system established within the organisation will ensure an objective, fair, and accountable approach to addressing staff welfare. Upholding human rights and workers' rights in the organisation's interactions with employees and organisational partners is paramount. Endeavours to improve employee welfare are fundamental to organisational productivity and sustainability.

### 2. Integritas Integrity

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan

The organisation and its staff are committed to carrying out work, making decisions, establishing policies fairly, and prioritising efforts to enhance the welfare of all employees. The system

seluruh karyawan dalam organisasi. Sistem yang ditetapkan dalam organisasi akan memastikan terjadinya pendekatan yang objektif, adil, dan akuntabel dalam mengupayakan kesejahteraan staf. Pemenuhan hak asasi manusia dan hak pekerja dijunjung dalam organisasi dalam relasi organisasi dengan karyawan dan mitra organisasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan merupakan hal yang mendasar untuk produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

### 3. **Loyalitas** Loyalty

Organisasi mengupayakan lingkungan kerja yang kondusif bagi staf untuk belajar, tumbuh dan produktif dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan kewajiban untuk membangun keterikatan dan kesetiaan staf terhadap organisasi. Staf berupaya untuk menjaga wibawa, kepentingan dan mandat organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Staf mengetahui posisi organisasi dalam seluruh kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi dan mendukung kerja-kerja advokasi tersebut. Staf harus melakukan segala upaya untuk mempromosikan kepentingan yang baik bagi organisasi.

### 4. **Disiplin** Discipline

Organisasi menegakkan kedisiplinan dengan menetapkan kebijakan secara transparan dan mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran. Proses akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Semua staf mematuhi dan menyesuaikan diri dengan petunjuk dan peraturan organisasi, baik dengan maupun tanpa pengawasan. Jika terjadi pelanggaran dan perselisihan, seluruh staf harus menjaga itikad baik untuk mencari jalan keluar dan solusi yang baik bagi kepentingan bersama.

established within the organisation will ensure an objective, fair, and accountable approach to addressing staff welfare. Upholding human rights and workers' rights in the organisation's interactions with employees and organisational partners is paramount. Endeavours to improve employee welfare are fundamental to organisational productivity and sustainability.

The organisation aims to cultivate a conducive work environment for staff to learn, grow and be productive. It recognizes that investing in human resources is essential to fostering staff engagement and loyalty. Staff are expected to uphold the organisation's authority, interests and mandate in carrying out their work. They are aware of the organisation's position in all advocacy efforts carried out and supports this work. Staff must make every effort to advance the organization's best interests.

The organisation enforces discipline by transparently establishing policies and taking action when violations occur. This process is carried out openly and with accountability. All staff are expected to adhere to organisational instructions and regulations, both with and without supervision. Should violations and disputes found, all staff are required to act in good faith in finding solutions that are reasonable for the common good.

## 5. Inklusif *Inclusive*

Organisasi berkomitmen untuk menjadi lembaga yang inklusif dan mandiri dalam lingkup kerja civil society organization. Dengan demikian, organisasi memastikan posisi dan arah strategis organisasi akan mengutamakan persatuan bangsa dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Seluruh staf dan organisasi turut bersikap penuh toleran terhadap perbedaan dalam dan di luar organisasi. Dalam perbedaan pendapat, semua staf dan organisasi harus saling menghormati dan santun dalam mengupayakan terjadinya dialog antar pribadi.

The organisation is dedicated to encouraging an inclusive and independent institution within the scope of work of civil society organisations. In doing so, it ensures its strategic position and direction prioritise national unity and nationalism toward the Indonesian state. All staff and organisations foster tolerance for differences within and outside the organisation. When differences of opinion arise, all staff and organisations are expected to respect each other and engage in polite interpersonal dialogue.

## 6. Partisipatif *Participative*

Organisasi berkomitmen untuk mendorong lingkungan kerja yang partisipatif dengan landasan bahwa semua pihak memiliki kapasitas dan tekad untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi, pendekatan partisipatif akan diupayakan. Pendekatan ini turut diterapkan dalam relasi eksternal organisasi dengan pihak lainnya, termasuk donor, pemerintah, parlemen, rekan OMS, akademisi, dan ahli lainnya.

The organisation is dedicated to fostering a participatory work environment where all stakeholders have the capacity and motivation to contribute to the organisation's advancement. A participatory approach will be embraced in planning, decision-making, implementation, monitoring, and evaluation. This inclusive approach extends to the organisation's external relations with other stakeholders, including donors, Government agencies, parliament, CSO partners, academics, and other experts.

## 7. Anti korupsi *Anti Corruption*

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk menegakkan etika anti suap dan antikorupsi dalam kebijakan organisasi, baik secara keuangan maupun relasi organisasi.

As a demonstration of transparency and accountability, the organisation is committed to upholding anti-bribery and anti-corruption ethics in organisational policies, both financially and in organisational relations.

Hubungan antara The PRAKARSA dan staf ditopang oleh nilai-nilai organisasi kami yaitu keadilan dan kesejahteraan, integritas, loyalitas, disiplin, inklusif, partisipatif dan anti korupsi serta dipandu standar perilaku dan etika yang ditetapkan dalam pelaksanaan program. Nilai-nilai ini secara teratur dikomunikasikan melalui rapat, pertemuan, kegiatan pelatihan, dan berbagai kegiatan eksternal yang dipimpin oleh tim

The relationship between The PRAKARSA and its staff is fortified by our organisational values, including justice and prosperity, integrity, loyalty, discipline, inclusiveness, participatory and anti-corruption measures. These values guide behavioural and ethical standards in program implementation. They are regularly communicated through meetings, gatherings, training activities and various external activities led by

manajemen, serta didukung oleh mekanisme whistle blower yang menyediakan berbagai saluran rahasia dan aman bagi staf untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai organisasi.

Komitmen kami terhadap keberlanjutan tertanam dalam strategi The PRAKARSA, yang memberikan arahan strategis jangka panjang berlandaskan tujuan mulia, relevan dan mampu bersaing untuk masa depan bagi The PRAKARSA. Strategi ini berdasar pada keyakinan utama kami bahwa produk pengetahuan yang ditunjang oleh kinerja staf yang baik akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Untuk memastikan bahwa visi, misi, strategi dan nilai organisasi dapat dipahami dan diinternalisasi dengan baik, maka manajemen terus melakukan berbagai upaya penguatan dan pengembangan.

the management team. Additionally, a whistleblower mechanism is in place to provide multiple confidential and secure channels for staff to report violations of the organisation's values.

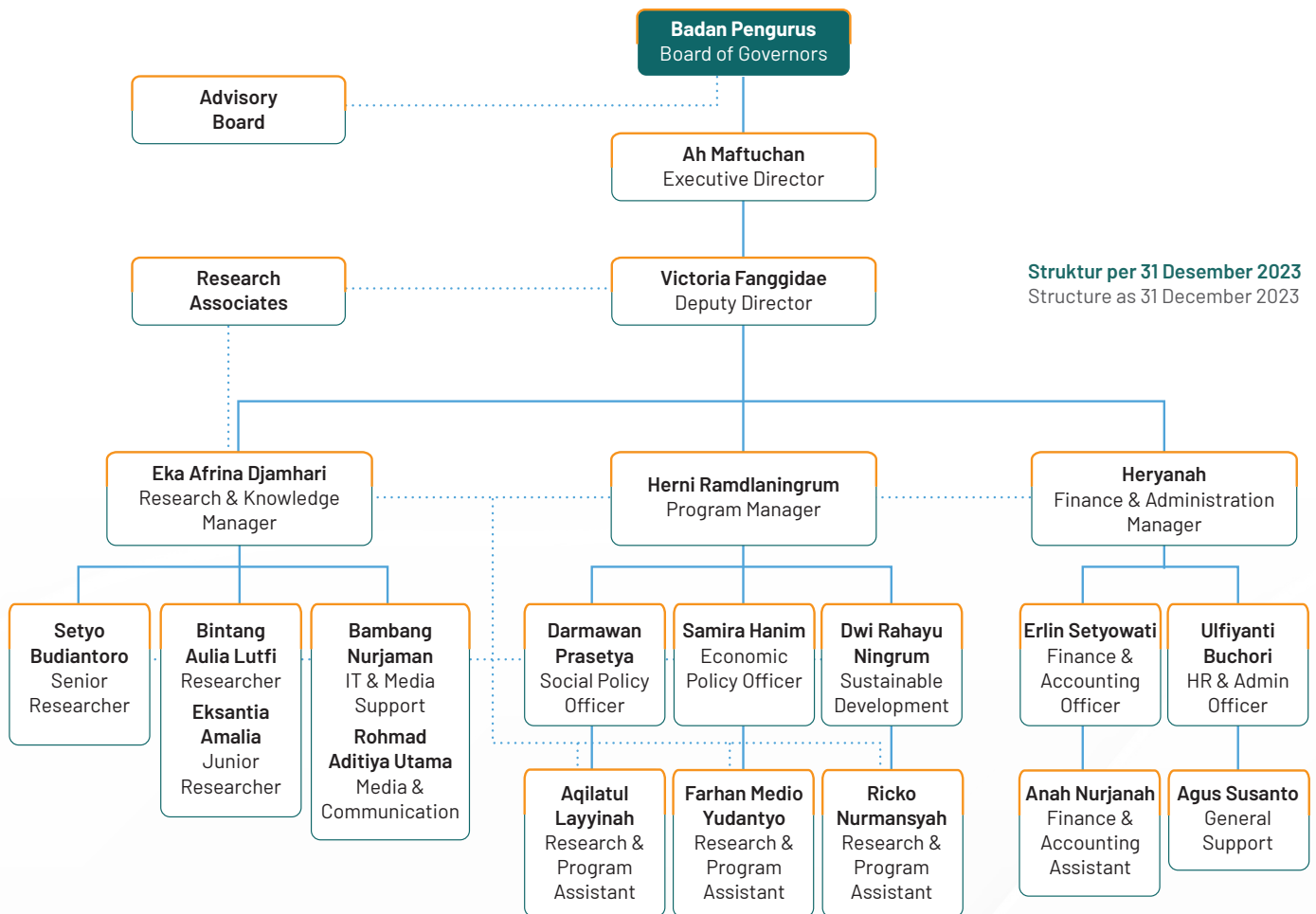
Our commitment to sustainability is ingrained in The PRAKARSA's strategy, which outlines long-term strategic direction based on noble goals, relevance, and and competitiveness for the organization's future. This strategy is founded on our belief that knowledge products supported by good staff performance will enhance organisational resilience and sustainability. Management continuously undertakes various strengthening and development efforts to ensure that the organisation's vision, mission, strategy and values are sufficiently understood and internalized by all stakeholders.





## » 5. Struktur dan Tata Kelola The PRAKARSA

### The PRAKARSA Structure and Governance



### 1. Pelaksana Harian Executive Leadership Team



#### Ah Maftuchan

##### Executive Director

Maftuchan menjabat sebagai Direktur Eksekutif The PRAKARSA sejak 2015 hingga sekarang. Sejak 2021, Maftuchan sedang menjalankan kuliah jenjang doktoral bidang kesejahteraan sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia. Maftuchan mendapatkan gelar magister kesejahteraan sosial (M.Kesos) dari universitas yang sama. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Maftuchan bekerja di the GIZ/Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, sebagai konsultan ahli bidang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai praktisi pembangunan dan pengamat kebijakan publik, Maftuchan sering menjadi narasumber dan memberikan layanan konsultasi kepada pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan swasta, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Maftuchan memiliki minat pada isu social policies, fiscal policies dan sustainable development.

Maftuchan has been serving as the Executive Director of The PRAKARSA from 2015. Since 2021, Maftuchan has been pursuing doctoral studies in social welfare at the Faculty of Social and Political Sciences - University of Indonesia. Prior to this, Maftuchan obtained a master's degree in social welfare (M.Kesos) from the same university. Before joining The PRAKARSA, Maftuchan worked as an expert consultant in good governance at the GIZ/Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit. As a development practitioner and public policy observer, Maftuchan frequently serves as a resource person and offers consulting services to the Government, civil society organisations and private companies in Indonesia and abroad. Maftuchan's areas of interest include social policies, fiscal policies, and sustainable development.



### **Victoria Fanggidae**

#### **Deputy Executive Director**

Victoria menjabat sebagai Deputy Direktur The PRAKARSA sejak akhir tahun 2021. Ia memiliki gelar doktor dalam bidang Social Policy, Sociology and Social Theory pada School of Social and Political Sciences (SSPS) di Faculty of Arts, di University of Melbourne Australia. Ia juga mendapatkan gelar master's in development studies dari universitas yang sama. Sebelum di PRAKARSA, Victoria bekerja sebagai staf dan konsultan di berbagai lembaga internasional di Indonesia seperti UNFPA, ILO, Oxfam dan UN-WFP untuk isu pembangunan sosial dan kemanusiaan, dan magang pada lembaga advokasi Global Poverty Project di Melbourne. Victoria berpengalaman dalam mengelola proyek dari berbagai donor internasional dan dalam mengkoordinir berbagai riset yang dilakukan PRAKARSA serta memastikan proses quality control produk tulisan PRAKARSA seperti laporan riset, policy brief dan buku. Minat riset Victoria adalah kebijakan sosial, khususnya jaminan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan publik.

Victoria has been serving as the Deputy Director at The PRAKARSA since late 2021. She holds a Doctorate in Social Policy, Sociology and Social Theory from the School of Social and Political Sciences (SSPS) in the Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia. Additionally, she obtained a master's degree in development studies from the same university. Prior to joining The PRAKARSA, Victoria worked as staff and consultant at various international institutions in Indonesia, such as UNFPA, ILO, Oxfam and UN-WFP on social and humanitarian development issues. She also interned at the Global Poverty Project advocacy institution in Melbourne. Victoria has extensive experience managing projects funded by various international donors, coordinating research carried out by PRAKARSA, and ensuring the quality control process for organization-produced materials such as research reports, policy briefs, and books. Her research interests are social policy, particularly social security, employment and public health.



## **HERNI RAMDLANINGRUM**

### **Program Manager**

Herni bergabung di PRAKARSA sejak 2018 sebagai Manager Program. Herni memperoleh gelar master dibidang Kebijakan Publik dengan spesialisasi Kebijakan Sosial dari The Australian National University (ANU). Sebelum bergabung di PRAKARSA, Herni berpengalaman sebagai Project Management Unit Specialist di UNDP, bertanggungjawab memberikan dukungan analisis dan operasional proyek, memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut yang efektif dan mendukung koordinasi kegiatan yang dilaksanakan dengan Badan Restorasi Gambut(BRG). Selain itu, Herni juga pernah bekerja sebagai Community Outreach and Empowerment Leader di Zoological Society of London (ZSL), sebuah lembaga konservasi dibawah pemerintah kerajaan Inggris. Herni memiliki minat dan menggeluti isu GEDSI, kebijakan sosial, keuangan berkelanjutan dan pajak berkeadilan. Bidang keahlian yang dimiliki Herni adalah penelitian, fasilitasi partisipatif, lobby, dan advokasi kebijakan.

Herni joined with The PRAKARSA in 2018 as Program Manager. She obtained a master's degree in Public Policy with a specialisation in Social Policy from The Australian National University (ANU). Before joining The PRAKARSA, Herni gained experience as a Project Management Unit Specialist at UNDP, where she was responsible for providing project analysis and operational support, ensuring effective planning and implementation of peat restoration activities and supporting the coordination of activities carried out with the Peat Restoration Agency (BRG). Additionally, Herni has worked as a Community Outreach and Empowerment Leader at the Zoological Society of London (ZSL), a conservation institution under the British Government. She has interest and involved in GEDSI issues, social policy, sustainable finance, and fair taxes. Herni's areas of expertise include research, participatory facilitation, lobbying and policy advocacy.



## **EKA AFRINA DJAMHARI**

### **Research and Knowledge Manager**

Eka merupakan Manajer Penelitian dan Pengetahuan di The PRAKARSA periode 2022 - sekarang. Eka menyelesaikan program Magister Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia. Sebelum bekerja di The PRAKARSA (Desember 2016), Eka memiliki pengalaman sebagai konsultan di berbagai lembaga pemerintahan, NGO lokal dan internasional, serta sektor swasta yang bekerja di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan hidup. Eka tertarik untuk meneliti isu-isu terkait kebijakan dan fenomena sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan dan ketimpangan. Eka juga kerap mengkritisi dan memberikan opsi-opsi perbaikan kebijakan melalui dialog dan publikasi media.

Eka is PRAKARSA's Research and Knowledge Manager for 2022 to the present. Eka completed the Master of Social Welfare program at the University of Indonesia. Before joining The PRAKARSA in December 2016, Eka gathered her experience as a consultant in various government agencies, local and international NGOs, and the private sector, working in the social, educational, health, humanitarian and

environmental fields. Eka has interest in researching issues related to policy and social phenomena such as poverty and inequality. She also often criticises and provides options for policy improvement through dialogue and media publications.



### **Heryanah**

#### **Finance and Administration Manager**

Heryanah adalah Manager Keuangan dan Administrasi di The PRAKARSA sejak 2018 – sekarang. Heryanah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banda Aceh. Sebelum di The PRAKARSA, Heryanah bekerja di NGO International dan beberapa NGO lokal dengan bidang pekerjaan yang semuanya berhubungan dengan masalah keuangan. Heryanah memiliki pengalaman dalam proses audit, baik audit organisasi maupun audit proyek, melakukan perbaikan regulasi keuangan beserta dokumen-dokumen internal yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan keuangan. Heryanah saat ini sedang aktif melakukan pendampingan keuangan dari konsultan terkait masalah perpajakan.

Heryanah has been the Finance & Administration Manager at The PRAKARSA from 2018. Heryanah completed her Bachelor of Economics in Management at the Indonesian College of Economics, Banda Aceh. Before joining The PRAKARSA, Heryanah worked at an international NGO and several local NGOs in areas of work related to financial matters. Heryanah is experienced in the audit process, both organisational and project audits, improving financial regulations and internal documents used as supporting documents in financial reports. Heryanah is currently actively providing financial assistance from consultants regarding tax issues.



### **Ulfiyanti Buchori**

#### **HR & Administration Officer**

Ulfi menjabat sebagai Human Resource and Administration Officer periode 2022 sampai dengan saat ini. Ulfi menyelesaikan program Sarjana Manajemen dengan fokus sumber daya manusia (SDM) di Universitas Pamulang. Sebelum di The PRAKARSA, Ulfi menjabat sebagai Human Resource di private sector selama tujuh tahun bidang telekomunikasi, berkolaborasi dengan Universitas Telkom, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), dan sekolah-sekolah untuk menyerap tenaga kerja dan pemenuhan SDM yang berkualitas. Sejak awal tahun 2023 Ulfi bersama dengan staf lainnya sedang membangun unit bisnis Lembaga dan didampingi oleh Konsultan expert, yang bertujuan untuk kemandirian keuangan Lembaga.

Ulfi has served as Human Resources and Administration Officer from 2022 until now. Ulfi completed the Bachelor of Management program focusing on human resources (HR) at Pamulang University. Before joining The PRAKARSA, Ulfi served as Human Resources Officer for seven years in the telecommunications sector, collaborating with Telkom University, the Center for Job Training Development (BBPLK), and schools, to recruit and to develop skilled workers.

Since the start of 2023, Ulfi, together with other staff, has been constructing a business unit for the Institution, with the guidance of expert consultants. The objective is to help the Institution achieve financial independence.



### Darmawan Prasetya

#### Social Policy Officer

Awan merupakan Officer kebijakan sosial di The PRAKARSA sejak tahun 2022. Awan menyelesaikan pendidikan masternya pada program Kebijakan Kesejahteraan dan Management di Lund University, Swedia. Awan memiliki ketertarikan pada isu jaminan sosial, perlindungan sosial, GEDSI, pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan yang inklusif. Awan juga tergabung dalam beberapa proses advokasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional pada isu kebijakan sosial. Selama di The THE PRAKARSA, Awan terlibat dalam penelitian tentang isu ketenagakerjaan yang inklusif, kemiskinan multidimensi, rantai pasok global yang berkeadilan, dan jaminan kesehatan. Awan juga aktif berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah di beberapa media seperti The Conversation, East Asia Forum, The Jakarta Post, dan Vice.

Awan has been a social policy officer at The PRAKARSA since 2022. He completed his master's in the Welfare Policy and Management program at Lund University, Sweden. Awan's interest area span from social security, social protection, GEDSI, poverty alleviation, to inclusive employment. He is actively involved in several advocacy processes concerning local, national, and international social policy issues. During his tenure at The PRAKARSA, Awan has conducted research on inclusive employment issues, multidimensional poverty, equitable global supply chains, and health insurance. He also makes significant contributions to scientific articles published in several media outlets such as The Conversation, East Asia Forum, The Jakarta Post, and Vice.



### Dwi Rahayu Ningrum

#### Sustainable Development Officer

Dwi mulai bergabung di The PRAKARSA sejak 2015 dan sejak 2021 ia dipercaya sebagai Officer Kebijakan Sustainable Development. Dwi menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang pada program studi Agribisnis. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Dwi terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian kampus dengan topik penelitian terkait ekonomi pertanian. Dwi tertarik pada isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, kesetaraan gender, serta bisnis dan hak asasi manusia. Dwi terlibat dalam advokasi kebijakan terkait isu-isu tersebut baik untuk pemerintah dan pihak swasta. Beberapa topik yang menjadi area penelitian Dwi adalah kemiskinan multidimensi, aliran keuangan gelap, perdagangan rokok ilegal, dan beberapa riset terkait praktik pembiayaan perbankan di sektor ekstraktif hingga inklusi keuangan.

Dwi joined The PRAKARSA in 2015, and has served as the Sustainable Development Policy Officer since 2021. She completed his undergraduate education at Brawijaya University Malang in the Agribusiness study program. Before joining The PRAKARSA, Dwi actively participated in various research activities, including research topics



related to agricultural economics. Dwi's professional interest lie in sustainability issues including climate change, a just energy transition, gender equality, and business and human rights. She is actively engaged in policy advocacy concerning these issues for the Government and the private sector. His research areas encompass multidimensional poverty, illicit financial flows, illegal cigarette trade, and research related to banking financing practices in the extractive sector to financial inclusion.



### **Samira Hanim**

#### **Fiscal Policy Officer**

Samira merupakan Officer kebijakan ekonomi di The PRAKARSA pada periode 2022 – sekarang. Samira menyelesaikan program Sarjana dan Magister Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya Malang. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Samira memiliki pengalaman bekerja sebagai konsultan keuangan di berbagai perusahaan swasta yang bergerak di sektor keuangan dan manajemen investasi. Samira berpengalaman melakukan penelitian kuantitatif di bidang manajemen keuangan. Samira memiliki ketertarikan untuk mendalami isu-isu terkait manajemen keuangan, manajemen investasi, kebijakan ekonomi, dan kebijakan perpajakan. Samira juga aktif tergabung dalam koalisi perpajakan di Indonesia sebagai anggota dari Forum Pajak Berkeadilan Indonesia dan juga dalam jaringan koalisi Asia yaitu sebagai anggota dalam Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA).

Samira has been serving as the Economic Policy Officer at The PRAKARSA since 2022. She completed both her Bachelor's and Master's programs in Business Administration at Brawijaya University, Malang. Prior to joining The PRAKARSA, Samira gained valuable experience as a financial consultant in various private companies operating in the economic and investment management. With a background in financial management, Samira has conducted extensive quantitative research in this field. Her professional interests extend to areas such as financial management, investment management, economic policy and tax policy issues. Furthermore, Samira participates in tax advocacy efforts in Indonesia by being a member of the Indonesian Fair Tax Forum and contributes to the Asian coalition network as a member of Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA).



### **Aqilatul Layyinah**

#### **Program and Research Assistant**

Aqila bergabung di The PRAKARSA sejak Oktober 2019 sebagai asisten program dan riset divisi kebijakan sosial. Aqila menyelesaikan pendidikan sarjananya pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP, Universitas Indonesia. Aqila memiliki ketertarikan pada isu kesehatan, perlindungan sosial, kelanjutusiaan, ketenagakerjaan, disabilitas dan penanganan kemiskinan. Aqila juga tergabung dalam beberapa forum advokasi di tingkat nasional dan internasional seperti Forum Reformasi Jaminan Sosial (FORJamsos), Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut (KuMPUL), Vaccinne Access and Global Health working group C20 Indonesia.

Aqila joined The PRAKARSA in October 2019 as a program and research assistant in the social policy division. She completed her undergraduate education in the Social Welfare Studies program at FISIP, University of Indonesia. Aqila's interests span various areas including health, social protection, ageing, employment, disability, and poverty management. Moreover, Aqila actively participates in several advocacy forums at national and international levels. She is a member of the Social Security Reform Forum (FORJamsos), Coalition for Communities Caring for the Elderly (KuMPUL), Vaccine Access and Global Health working group C20 Indonesia.



### Farhan Medio Yudantyo

#### Program and Research Assistant

Farhan bergabung di The PRAKARSA sebagai Asisten Program dan Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Fiskal sejak 2022 - sekarang. Farhan menyelesaikan pendidikan program Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA (November 2022), Farhan pernah bekerja sebagai staf evaluasi dan monitoring di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dengan fokus isu terkait kebijakan pengembangan regional. Selain itu, Farhan pernah menjadi Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) UGM dengan tugas utama yaitu membantu proyek penelitian serta mengelola program pelatihan. Farhan memiliki minat dan perhatian pada isu ekonomika pembangunan, khususnya terkait ketimpangan gender dan kemiskinan. Farhan memiliki pengalaman penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif.

Farhan joined at The PRAKARSA as a Program and Research Assistant for Economic and Fiscal Policy since 2022. He completed his Bachelor's degree program in Economics at the Faculty of Economics and Business (FEB) Gadjah Mada University (UGM). Prior to joining The PRAKARSA in November 2022, Farhan served as an Evaluation and Monitoring staff at the Ministry of National Planning and Development (PPN)/Bappenas, focusing on issues related to regional development policy. In addition, Farhan worked as a research assistant at the UGM Center for Sharia Economics and Business Studies (PKEBS), where he researches projects and managed training programs His professional interests revolve around development economics, with a particular focus on gender inequality and poverty. Farhan has extensive research experience utilizing quantitative methods.



### Ricko Nurmansyah

#### Program and Research Assistant

Ricko merupakan Asisten Program dan Penelitian Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di The PRAKARSA sejak 2022. Ricko menyelesaikan pendidikan program Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Ricko memiliki pengalaman sebagai staf di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lembaga penelitian di bidang ekonomi dan sumber daya alam serta

bertanggungjawab menyusun transisi ekonomi hijau. Ricko memiliki minat untuk meneliti isu-isu terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan dan proses transisi ekonomi hijau pada sektor moneter dan sektor riil.

Ricko has been serving as a Program and Research Assistant for Sustainable Development Policy at The PRAKARSA since 2022. He completed a Bachelor's degree in Economics at the Bogor Agricultural Institute (IPB). Prior to joining at The PRAKARSA, Ricko gained experience as staff at the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) and various research institutions focusing on economics and natural resources. In these roles, he was responsible for preparing the green economic transition. Ricko's research interests primarily focus on issues related to sustainable development policies and the process of transitioning to the green economy within both the monetary and real sectors.



---

**Setyo Budiantoro****Senior Researcher**

---

Setyo Budiantoro adalah peneliti senior di The PRAKARSA. Ia mendapatkan gelar masternya di bidang Ekonomi Pembangunan di International Institute of Social Studies (ISS) dari Erasmus University Rotterdam dan menyelesaikan program pelatihan Analisis Kemiskinan Multidimensi oleh Universitas Oxford dan Universitas George Washington. Dia memenangkan beberapa kompetisi pada ide-ide pengembangan serta penulis yang produktif dalam analisis kebijakan, artikel dan buku.

Setyo Budiantoro is a senior researcher at The PRAKARSA. He earned his master's degree in Development Economics at the International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam. Additionally, he completed the Multidimensional Poverty Analysis training program at Oxford University and George Washington University. He has won several competitions on development ideas and is a prolific writer of policy analysis, articles, and books.



---

**Nor Ismah****Senior Researcher**

---

Nor Ismah adalah salah satu peneliti senior di The PRAKARSA. Ia menyelesaikan studi doctoral di Leiden University Institute for Area Studies (LIAS) setelah sebelumnya memperoleh gelar MA dalam bidang Studi Asia Tenggara dari School of Pacific and Asian Studies di University of Hawaii di Manoa, Amerika Serikat. Penelitiannya berfokus pada bidang-bidang seperti Islam, produksi pengetahuan perempuan, dan media. Nor Ismah terpilih sebagai finalis Gosling-lim 2023 dan Association of Asian Studies Postdoctoral Fellowship in Southeast Asian Studies. Beasiswa bergengsi ini diselenggarakan di Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Michigan.

Nor Ismah is a senior researcher at The PRAKARSA. She completed her doctoral studies at the Leiden University Institute for Area Studies (LIAS) following her MA in Southeast Asian Studies from the School of Pacific and Asian Studies at the University of Hawaii at Manoa, United States. Her research focuses on Islam, women's

Asian Studies Postdoctoral Fellowship in Southeast Asian Studies. This prestigious scholarship is hosted at the Center for Southeast Asian Studies at the University of Michigan.



### Andreas Darmega Sihotang

#### Senior Researcher

Andreas merupakan peneliti senior The PRAKARSA sejak 2023. Andreas mendapatkan gelar Ph.D. di Truman School of Government and Public Affairs, University of Missouri di Columbia, A.S. dan gelar Master of Arts in Conflict Transformation dari Center for Justice and Peace, Eastern Mennonite University di Virginia. Andreas memiliki minat penelitian pada isu terkait partisipasi publik, kinerja organisasi publik, analisis kebijakan, dan evaluasi program. Sebelumnya, Andreas pernah bekerja untuk badan PBB dan organisasi nirlaba selama lebih dari 15 tahun dengan peran berbeda di bidang bantuan kemanusiaan, sensitivitas konflik dan pembangunan perdamaian, pembangunan internasional, dan advokasi kebijakan.

Andreas has been a senior researcher at The PRAKARSA since 2023. He obtained his Ph.D. from the Truman School of Government and Public Affairs, University of Missouri in Columbia, USA and a Master of Arts in Conflict Transformation from the Center for Justice and Peace, Eastern Mennonite University in Virginia. Andreas has research interests in public participation, public organisation performance, policy analysis, and program evaluation. Previously, he worked for UN agencies and non-profit organisations for more than 15 years in different roles in humanitarian assistance, conflict sensitivity and peacebuilding, international development, and policy advocacy.



### Bintang Aulia Lutfi

#### Researcher

Bintang saat ini menjabat sebagai peneliti The PRAKARSA periode 2023. Bintang menyelesaikan Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, Bintang telah aktif terlibat dalam riset ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah. Dia bekerja sebagai asisten riset dan surveyor, berkolaborasi dengan dosen dan mitra pemerintah untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi terkait dengan proyek-proyek penelitian. Saat ini, Bintang memiliki ketertarikan yang mendalam pada berbagai isu yang terkait dengan ekonomi, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat dan masalah keuangan.

Bintang currently serves as a The PRAKARSA researcher for the 2023 period. She completed a Master of Science in Islamic Economics at Airlangga University. Before joining The PRAKARSA, Bintang was actively involved in development economics and sharia economics research. She worked as a research assistant and surveyor, collaborating with faculty and government partners to collect data and analyse information related to research projects. Currently, Bintang has a deep interest in various issues related to the economy, especially in terms of social welfare and financial issues.



### **Eksanti Amalia Kusuma Wardhani**

#### **Junior Researcher**

Eksanti merupakan Peneliti Junior The PRAKARSA dari tahun 2024. Eksanti menyelesaikan pendidikan program Sarjana di bidang Manajemen dan Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Eksanti telah bekerja sebagai konsultan penelitian di Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Asia Tenggara pada isu perempuan dan pasar tenaga kerja. Eksanti juga menjadi konsultan penelitian di The PRAKARSA dengan membantu melaksanakan riset-riset di bidang ekonomi hingga pembangunan berkelanjutan. Selain menjadi konsultan penelitian, Eksanti juga pernah berdinamika di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) sebagai peneliti magang di Departemen Politik dan Perubahan Sosial dengan fokus pada isu politik elektoral.

Eksanti has been a Junior Researcher since 2024. She completed a Bachelor's in Management and Public Policy at the Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University. Before working at The PRAKARSA, Eksanti was a research consultant on women's and labour market issues at Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia. Eksanti is also a research consultant at The PRAKARSA, where she assists carry out research in the fields of economics and sustainable development. Apart from being a research consultant, Eksanti has also worked at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) as an internship researcher in the Department of Politics and Social Change, focusing on electoral political issues.



### **Bambang Nurjaman**

#### **IT & Media Support**

Bambang menjabat sebagai bagian dari tim The PRAKARSA sejak tahun 2018. Ia memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Informatika, Universitas MH. Thamrin. Sebelum bergabung dengan The PRAKARSA, Bambang berpengalaman sebagai profesional IT dan graphic designer di berbagai institusi pendidikan dan swasta. Selain pendidikan formalnya, Bambang terus mengembangkan keterampilan kompetensinya melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan User Interface (UI) & User Experience (UX), serta keterampilan social media marketing.

Bambang has been part of The PRAKARSA team since 2018. He obtained a Bachelor's degree from the Department of Informatics Engineering at MH Thamrin University. Before joining The PRAKARSA, Bambang had experience as an IT professional and graphic designer in various educational and private institutions. Apart from his formal education, Bambang continues to develop his competency skills through different training, including User Interface (UI) & User Experience (UX) training and social media marketing skills.





### Rohmad Aditiya Utama

#### Media & Communication

Bergabung di The PRAKARSA sebagai Staf Media dan Komunikasi sejak 2022. Aditiya menyelesaikan pendidikannya dibidang Komunikasi dan Penyiaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia memiliki perhatian yang tinggi pada isu kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan demokrasi terutama yang berkaitan dengan media.

Adit joined with The PRAKARSA as a Media and Communications Staff member in 2022. He completed his education in Communications and Broadcasting at Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta. He is highly interested in issues of social welfare, the environment, and democracy, especially those related to the media.



### Erlin Setyowati

#### Finance and Accounting Officer

Erlin Setyowati bekerja di The PRAKARSA sejak 2018 sebagai Finance & Accounting Officer. Erlin merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelumnya, Erlin memiliki pengalaman kerja sebagai finance dan accounting di sektor swasta di bidang retail, manufaktur, dan properti. Erlin memiliki minat dibidang perpajakan nirlaba terutama yang berhubungan dengan NGO. Hingga saat ini Erlin telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang perpajakan yang berhubungan dengan perpajakan nirlaba untuk mendukung pengembangan organisasi.

Erlin Setyowati has worked at The PRAKARSA since 2018 as a Finance & Accounting Officer. She is a graduate of a Bachelor of Economics in Accounting from the Veteran National Development University, Jakarta. Previously, Erlin gained her work experience as a finance and accounting officer in the private sector, including roles in the retail, manufacturing and property sectors. She has an interest in non-profit taxation, especially as it pertains to NGOs. To date, Erlin has attended various trainings in the field of taxation about non-profit taxation to support organisational development.



### Anah Nurjanah

#### Finance and Accounting Assistant

Anah Nurjanah menjabat sebagai Finance & Accounting Asisstant di The PRAKARSA sejak 2018. Anah menyelesaikan program Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum bekerja di The PRAKARSA, Anah pernah bekerja di salah satu bank BUMN, selain itu juga aktif dalam kegiatan dibidang sosial masyarakat. Anah berpengalaman dalam transaksi keuangan di dunia perbankan dan NGO. Selain itu, Anah juga aktif dalam komunitas perbankan dan sering memberikan uptade informasi peraturan terbaru perihal transaksi keuangan yang terkait dengan perbankan.

Anah Nurjanah has been a Finance & Accounting Assistant at The PRAKARSA since 2018. She obtained her Bachelor and Master Degree of Accounting program at Muhammadiyah University Jakarta. Before joining The PRAKARSA, Anah worked at a state-owned bank and was active in social activities. She has experience in financial transactions in both the banking and NGO sectors. Additionally, Anah is also active in the banking community and frequently provides updates on the latest regulatory information regarding financial transactions.



**Agus Susanto**

**General Support**

Agus bergabung dengan Perkumpulan The PRAKARSA sejak 2008 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan selama sepuluh tahun. Agus mendukung kebutuhan administrasi di dalam atau di luar kantor untuk semua kegiatan dalam The PRAKARSA.

Agus joined with The PRAKARSA Association in 2008 after working at a consulting company for ten years. Agus supports administrative needs both inside or outside the office for all activities within the PRAKARSA Association.

**2. Badan Pengurus** Board of Governors



**Purnama Adil Marata**  
Ketua Chairperson



**Ati Nurbaiti**  
Sekretaris Secretary



**Binny Buchori**  
Bendahara Treasurer



**Sugeng Bahagijo**  
Anggota Member



**Yuyun Y Ismawati**  
Anggota Member



**Dr M. Hanif Dhakiri**  
Anggota Member

### 3. Research Associates Research Associates



**Prof. Hasbullah Thabrany**  
Universitas Indonesia (UI)



**Prof. Andrew Rosser**  
University of Melbourne



**Edi Suharto, Ph.D**  
STKS



**Poppy Ismalina, Ph.D**  
Universitas Gadjah Mada



**A Prasetyantoko, Ph.D**  
Universitas Atma Jaya



**Fachru Novrian, Ph.D**  
UPN Jakarta



**Dr Arie Sujito**  
Universitas Gadjah Mada



**Ass. Prof. Zulfan  
Tadjoeddin, Ph.D**  
Western Sydney University



**Dr Fajar Luhur Martha**

#### 4. Badan Penasehat Advisory Board



**Zumrotin K. Susilo**



**Filomeno Sta. Ana III**

### » 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Development



**Sebagai organisasi yang terus tumbuh, kami juga berkomitmen tumbuh bersama dengan SDM organisasi.**

**As an organisation committed to continuous growth, we prioritize the development of our human resources.**

Kami berupaya terus membangun kapabilitas staf melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, termasuk dalam hal digitalisasi dan inovasi. Kami juga berupaya meningkatkan kompetensi dari para mitra OMS untuk mendukung ekosistem organisasi. Ini menunjukkan prinsip kami untuk menjalankan organisasi secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap publik.

Pada tahun 2023, secara internal organisasi kami memfasilitasi sebanyak 14 pelatihan kepada staf

We aim to enhance staff capabilities through various training programs, focusing on digitalisation and innovation. Additionally, we endeavour to empower our Civil Society Organization CSO partners to support the organisational ecosystem. This commitment underscores our principle of sustainable organizational management and our dedication to the community.

In 2023, we conducted 14 internal training sessions for both program



program dan support. Pelatihan antara lain mengenai pengelolaan program, kampanye publik dan media, perpajakan dan standar keuangan, dan pelatihan pengembangan organisasi seperti unit bisnis.

Selain pelatihan yang dilaksanakan dengan pelibatan narasumber eksternal, kami juga secara rutin menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM melalui sharing knowledge internal. Sharing knowledge dapat dilakukan antar staf dalam organisasi, dengan tema yang beragam. Sharing knowledge yang dilakukan pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 6 kali. Isu-isu yang dibahas antara lain mengenai penulisan press release dan engagement dengan media, akuntabilitas keuangan, GEDSI, fundraising (menulis proposal donor), metode riset dan kampanye media.

Sejak tahun 2021, kami juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pendidikan staf melalui bantuan dana pendidikan dan keringanan dalam hal jam kerja. Pada tahun 2023, terdapat tiga orang staf yang melanjutkan pendidikan, satu staf untuk jenjang pendidikan S2 dan satu staf di tingkat S3.

Berkat dari semangat dan kerja keras seluruh staf, The PRAKARSA mampu membukukan kinerja yang baik pada tahun 2023, sehingga menjadi sebuah landasan yang baik untuk pertumbuhan ke depannya.

and support staff. These sessions will cover diverse topics including program management, public and media campaigns, taxation and financial standards, and business unit development.

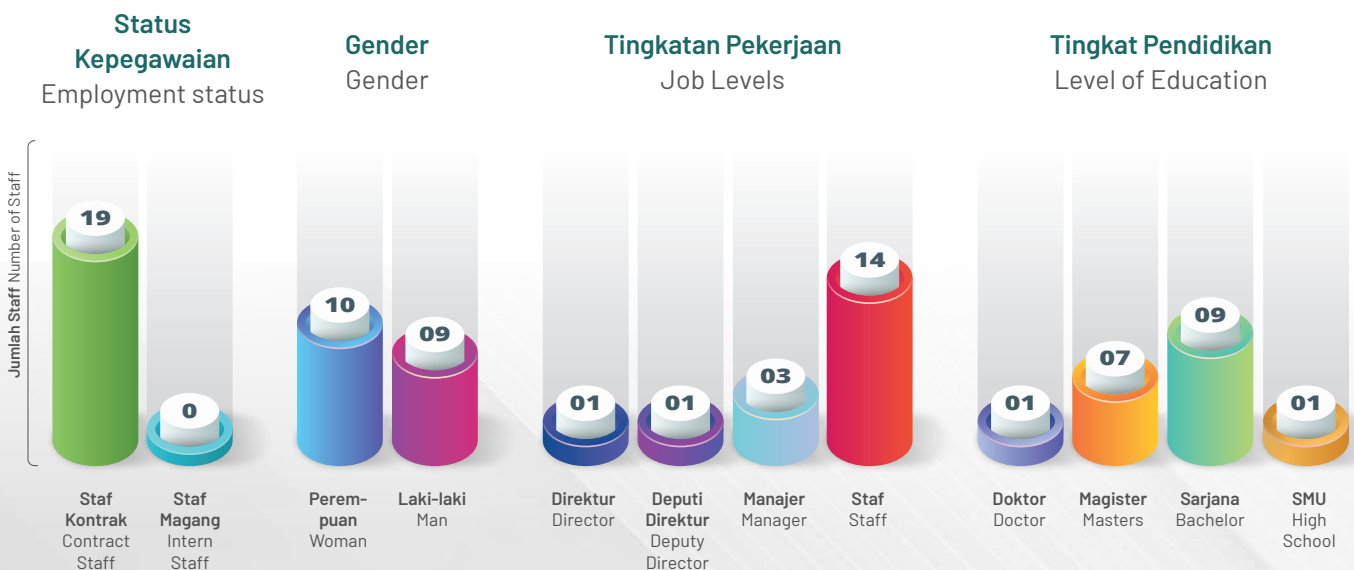
Furthermore, besides external training initiatives, we regularly facilitate HR capacity building through internal knowledge sharing. These sessions, scheduled six times in 2023, enable staff members to share expertise on various themes such as writing press releases, financial accountability, Gender Equality, Diversity, and Social Inclusion (GEDSI), fundraising strategies (including donor proposal writing), research methodologies, and media campaign tactics.

Since 2021, we have also been dedicated to supporting staff education by providing educational funding assistance and flexible working hours. In 2023, three staff members will pursue further education, including one at the master's level and one at the doctoral level.

Thanks to the enthusiasm and hard work of all staff members, The PRAKARSA achieved significant success in 2023, laying a solid foundation for future growth.

### Komposisi Staf/ Pelaksana Harian

Composition of Staff/ Executive Leadership Team





## **Kesejahteraan** Well-being

The PRAKARSA menempatkan kesejahteraan staf sebagai prioritas dalam aspek sumber daya manusia. Kami menjalankan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membangun organisasi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan staf. Kesejahteraan mencakup aspek fisik, emosional dan mental. Salah satu upaya yang kami lakukan di tahun 2023 adalah dengan masih memberlakukan keseimbangan kerja dari kantor dan kerja dari rumah. Kami berkomitmen untuk mendukung staf agar dapat bekerja dengan sehat dan produktif, khususnya bagi ibu yang bekerja dengan anak.

At The PRAKARSA, staff welfare is a top priority in our human resources management. We have developed a comprehensive strategy aimed at enhancing the quality of our human resources while also ensuring the well-being of our staff. This encompasses attention to physical, emotional, and mental health aspects.

In 2023, one of our key initiatives involves promoting a balanced approach to work, both in-office and remote. We are dedicated to supporting our staff in maintaining healthy and productive work environments, with particular focus on assisting working mothers with childcare responsibilities.

## **Kesetaraan gender, keberagaman dan inklusi** Gender equality, diversity and inclusion



The PRAKARSA adalah organisasi yang terbuka untuk semua orang dan kami terus berusaha untuk meningkatkan inklusifitas. Kami sangat mendukung adanya kesetaraan gender, hal ini dapat dilihat dengan representasi perempuan di level manajemen mencapai 100% di tahun 2023. Di tingkat Direksi, komposisi perempuan dan laki-laki sebesar 50:50 di mana Direktur Eksekutif ditempati oleh laki-laki dan Deputy Direktur ditempati oleh perempuan.

Kami juga memiliki kebijakan untuk mendukung kebutuhan khusus untuk staf perempuan di The PRAKARSA. Membangun lingkungan kerja yang setara, kami juga terus mendukung staf perempuan agar dapat berkembang dengan maksimal melalui berbagai pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti waktu kerja yang fleksibel. Bagi staf perempuan yang memiliki anak sampai usia dua tahun maka untuk mencapai 8 jam kerja sehari,

At The PRAKARSA, we embrace inclusivity and strive to create an environment that is open to everyone. Gender equality is a core value that we strongly support, as evidenced by our efforts to ensure equal representation of women at all levels of leadership. In 2023, women will comprise 100% of the management team, demonstrating our commitment to gender parity. At the Board of Directors level, we maintain a balanced composition with a 50:50 ratio of men and women, where both men and women, hold roles as the Executive Director and the Deputy Director.

At The PRAKARSA, we are committed to fostering an equal and inclusive working environment, which includes supporting the unique needs of our female staff members. To facilitate their optimal development, we have implemented various arrangements tailored to their needs, such as flexible working hours. For female staff with children up to two years of age,

maka staf diberikan kelonggaran durasi waktu kerja, dan dapat mengajukan tambahan izin atau cuti untuk tujuan perawatan balita dan force majeure lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan in-person-meeting di dalam dan/atau di luar kota dapat didampingi oleh baby-sitter atau keluarga. Kami juga memberikan cuti haid, cuti melahirkan dan cuti untuk para-ayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami terus berupaya untuk mendukung kesempatan yang sama bagi semua orang dan mendukung keberagaman usia, gender, budaya, agama, etnis dan disabilitas, walaupun masih banyak kekurangan dalam implementasinya karena berbagai kendala yang bersifat eksternalitas seperti struktur dan komposisi pasar kerja Indonesia.

we provide flexibility in working hours, allowing them to reach their required 8 hours of work per day through their available hours. Additionally, they are granted leeway in their working time duration and can apply for additional permits or leave to attend to their toddlers or handle unforeseen circumstances. Furthermore, they have the option to be accompanied by a babysitter or family during in-person-meeting both locally and outside the city. We also adhere to regulations by providing menstrual, maternity, and paternity leave per applicable regulations.

We are dedicated to promoting equal opportunities and diversity in age, gender, culture, religion, ethnicity, and disabilities. However, we acknowledge that there are still shortcomings in the implementation of these policies, largely due to external constraints such as the structure and composition of the Indonesian labor market. Nevertheless, we remain committed to addressing these challenges and continuously improving our practices.



| 02

## Capaian Utama Highlights of Achievements

**Sepanjang tahun 2023, kami memperluas kerja jejaring antar think-tank salah satunya yakni dengan menginisiasi pembentukan think-tank network di ASEAN bersama dengan Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS).**

In 2023, we intensified our networking work between think tanks by establishing a think-tank network in ASEAN with the Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS).





## » 1. Mengembangkan jejaring antar think-tank, OMS dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan

Develop networks between think tanks, CSOs and the private sector in initiating policy reform



**Sepanjang tahun 2023, kami memperluas kerja jejaring antar think-tank salah satunya yakni dengan menginisiasi pembentukan think-tank network di ASEAN bersama dengan Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS).**

**In 2023, we intensified our networking work between think tanks by establishing a think-tank network in ASEAN with the Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS).**

Kami telah berkontribusi untuk perubahan kebijakan di tingkat ASEAN untuk keadilan fiskal. Kerja sama ini bertujuan untuk mempengaruhi masalah fiskal di ASEAN dan negara-negara anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah berhasil dilakukan The PRAKARSA dan VESS pada tahun sebelumnya, kedua organisasi sepakat untuk terus berkolaborasi untuk memperbarui studi tentang insentif pajak di ASEAN dan memperluas cakupan belanja pendidikan publik. Hal ini sejalan dengan misi The PRAKARSA untuk mengembangkan jejaring antar think-tank, OMS dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan.

Kami juga secara konsisten mengawal agenda G20 secara aktif melalui sejumlah agenda

We have contributed to policy change at the ASEAN level, focusing on issues related to fiscal justice. This collaboration aims to influence fiscal issues not only in ASEAN but also in its member countries. Building upon the successful research results that The PRAKARSA and VESS successfully carried out in the previous year, we have agreed to continue our collaboration to update studies on tax incentives in ASEAN and expand the scope of public education spending. These initiatives are aligned with The PRAKARSA's mission to foster networks among think tanks, Civil Society Organizations (CSOs), and the private sector to drive policy reform.

In 2023, we maintained consistent and active engagement with the





G20 di India pada tahun 2023. Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, menjadi salah satu pembicara utama dalam pembukaan C20 Inception Meeting 2023 di Nagpur, Maharashtra, India. Selain itu, Board The PRAKARSA, yang diwakili oleh Binny Buchori, turut terlibat dalam pembukaan acara tersebut sebagai bagian dari International Advisory Committee C20 di India. Di tengah-tengah upaya kolaboratif, kami juga memimpin koordinasi dalam Workshop Formulasi Kebijakan untuk Disability, Equity, dan Justice Working Group di Civil 20 India pada tanggal yang sama. Tak hanya itu, pada 13 Juli 2023, kami bekerja sama dengan OHANA, sebuah organisasi penyandang disabilitas yang aktif dalam advokasi isu disabilitas di level nasional dan internasional, dalam workshop internasional yang bertajuk “Mendorong Penyediaan Perangkat Bantu dan Teknologi di Global Selatan: Hambatan dan Rencana Aksi yang Nyata” sebagai bagian dari acara C20 India. Keterlibatan kami dalam seluruh kegiatan ini mencerminkan komitmen kami untuk mendukung agenda pembangunan dan mengupayakan kesetaraan serta keadilan di tingkat global.

G20 agenda, particularly through our participation in several G20 agendas in India. Ah Maftuchan, the Executive Director of The PRAKARSA, served as one of the main speakers at the opening of the 2023 C20 Inception Meeting in Nagpur, Maharashtra, India. Additionally, The PRAKARSA Board, represented by Binny Buchori, played a significant role in the event’s opening as part of the C20 International Advisory Committee in India. Amidst our collaborative efforts, we also organized the Policy Formulation Workshop for the Disability, Equity, and Justice Working Group at Civil 20 India on the same date. Furthermore, on July 13, 2023, we collaborated with OHANA, an organization advocating for people with disabilities at national and international levels, in an international workshop entitled “Encouraging the Provision of Assistive Devices and Technology in the Global South: Obstacles and Plans Real Action” as part of the C20 India event. Our active involvement in these diverse activities underscores our commitment to supporting the development agenda and pursuing equality and justice at the global level.





## » 2. Produk-produk Pengetahuan yang Dihasilkan

### The Knowledge Products Produced

The PRAKARSA menyelesaikan sembilan penelitian di tahun 2023, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak delapan penelitian.

The PRAKARSA completed nine studies in 2023; representing an increase from the eight studies completed in 2022.

#### Penelitian Study

##### Kebijakan Ekonomi Economic Policy



#### Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia

Ilicit Financial Flows in The Fisheries and Coal Mining Sectors and Their Derivative Products in Indonesia



#### Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina dan Vietnam

Analysis of Tax Asymmetry and Potential Revenue from Wealth Tax in Indonesia, The Philippines and Vietnam

#### Penelitian Study

##### Kebijakan Sosial Social Policy



#### Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia tahun 2012 - 2021

Indonesian Multidimensional Poverty Index 2012 - 2021



### Konsekuensi Finansial Pengobatan Kanker di Indonesia: Studi Kasus Penderita Kanker di Ibu Kota Jakarta

Financial Consequences of Cancer Treatment in Indonesia: Case Study of Cancer Patients in Jakarta, The Capital City

## Penelitian Study

### Kebijakan Pembangunan dan Berkelanjutan Sustainable Development



### Melacak kemajuan Sektor Perbankan dalam Pembiayaan Transisi Energi Indonesia untuk Mempercepat Net Zero Emission (NZE)

Tracking the Progress of the Banking Sector in Financing Indonesia's Energy Transition to Accelerate Net Zero Emission (NZE)



### Laporan Pemeringkatan bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia

Bank Rating Report 2022: Measuring the Progress of Sustainable Financial Policies in the Banking Sector in Indonesia



### Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital

Pocket Book for Smart Consumers of Digital Financial Products



**Buku Panduan untuk Bank: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Aspek Gender dalam Kerangka Pinjaman dan Investasi**

Bank Rating Report 2022: Measuring the Progress of Sustainable Financial Policies in the Banking Sector in Indonesia



**Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan**

Policy Recommendations: Disclosure and Reporting of Environmental, Social and Governance Aspects for Banking

Terdapat beberapa penelitian di tahun 2023 yang merupakan penelitian berkelanjutan yakni seperti Ilicit Financial Flows (IFF), Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) dan pemeringkatan bank.

In 2023, The PRAKARSA will continue research in several areas, including, Illicit Financial Flows (IFF), Multidimensional Poverty Index (MPI), and Bank Rating.

**Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia tahun 2012 - 2021**

Indonesian Multidimensional Poverty Index 2012 - 2021



**Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia tahun 2012 - 2021**  
Indonesian Multidimensional Poverty Index 2012 - 2021

Penelitian Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia dilakukan untuk periode 2012-2021. Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari kampanye kami dengan harapan ke depannya IKM digunakan sebagai pendekatan resmi pemerintah dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

The PRAKARSA sudah melaksanakan penelitian IKM ini sebanyak tiga kali sejak 2012, periode penghitungan pertama (2012-2014), periode penghitungan kedua (2015-2018), dan periode penghitungan ketiga

The Research on the Multidimensional Poverty Index in Indonesia was carried out from 2012 to 2021. This research represents a crucial aspect of our campaign to advocate for the official government adoption of the Multidimensional Poverty Index (MPI) as an official approach to poverty reduction interventions in Indonesia in the future.

The PRAKARSA has carried out a research on MPI for three times since 2012, covering three calculations period, the first period (2012-2014), the second period (2015-2018),



(2019-2021). komitmen ini sejalan dengan misi The PRAKARSA untuk memproduksi dan mempromosikan pengetahuan yang inovatif seperti metode penghitungan IKM. Metode penghitungan IKM ini dipilih karena dapat menghitung perkembangan penurunan kemiskinan berdasarkan dimensi dan indikator yang sesuai dengan karakteristik wilayah, etnis, dan kelompok sektoral lainnya.

and the third period (2019-2021). This commitment aligns with The PRAKARSA's mission to produce and promote innovative knowledge through MPI calculation methods. The method for calculating MPI was chosen because it enables the assessment of progress in poverty reduction based on dimensions and indicators, considering regional, ethnic, and other sectoral group characteristics.

### *Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju Indonesia Emas 2045*



### **Peluncuran Riset Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021**

Jakarta, 9 Agustus 2024

Peluncuran laporan penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2023 di Jakarta dan berhasil menghadirkan berbagai pihak di antaranya perwakilan OMS, akademisi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, media serta masyarakat umum. Kegiatan launching yang dihadiri oleh multi pihak mendorong terjadinya dialog antara organisasi masyarakat sipil dengan pengambil kebijakan secara interaktif.

The research report was launched in August 2023 in Jakarta, and succeeded convened various stakeholders, including representatives from CSOs, academics, ministries institutions, local governments, media and the general public. The launch event saw a diverse attendance, fostering interactive dialogue between civil society organizations and policymakers.





## Aliran Keuangan Gelap Pada Komoditas Perikanan dan Batu Bara

The Flow of Illicit Funds in Fisheries and Coal Commodities



**Aliran Keuangan Gelap Pada Komoditas Perikanan dan Batu Bara**  
The Illicit Financial Flows in Fisheries and Coal Commodities

Sedangkan pada isu IFF menyajikan analisis pada dua komoditas ekspor Sumber Daya Alam (SDA) primer di Indonesia, yaitu komoditas perikanan dan batu bara. Analisis berfokus pada estimasi besaran aliran keuangan gelap dan potensi hilangnya penerimaan negara. Penelitian seperti ini kami lakukan secara berkelanjutan sebagai upaya kontribusi kami dalam mendorong perancangan strategi penanggulangan praktik penghindaran pajak dan kebocoran pajak di Indonesia.

Meanwhile, the analysis of the IFF issue delves into two key Natural Resources (SDA) export commodities in Indonesia: fisheries and coal. The study primarily aims to estimate the magnitude of illicit financial flows and the potential loss of state revenue. We conduct research of this on an ongoing basis to contribute to the formulation of strategies aimed at addressing avoidance and tax leakage in Indonesia.



**Peluncuran Riset Aliran Keuangan Gelap Pada Komoditas Perikanan dan Batu Bara**

Kami juga secara aktif mempromosikan dan menyampaikan hasil penelitian ini dalam forum-forum internasional seperti Civil 20. Kami juga telah menyampaikan hasil penelitian dan melakukan dialog kepada Kementerian Keuangan. Melacak aliran keuangan gelap merupakan masalah yang membutuhkan kemauan politik pemerintah. Selain itu pada tataran global dan lintas batas negara, aturan global tentang perpajakan untuk perusahaan harus diubah. Di mana perusahaan multinasional harus dikenakan pajak sebagai entitas kesatuan. Pajak harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga negara-negara berkembang mendapatkan bagian yang adil atas transaksi multinasional. Saat ini hak perpajakan negara-negara berkembang berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan besar terutama yang bergerak di bidang digital dan beberapa negara kaya.

In addition to our research efforts, we actively promote and disseminate the results of our studies in international forums such as Civil 20. We have also engaged in a dialogue with the Ministry of Finance. Tracking illicit financial flows necessitates strong political will from the government. Furthermore, Furthermore, there is a pressing need for global tax reform to ensure fair taxation of multinational companies. Tax rules should be revised to treat multinational corporations as unitary entities and to ensure that developing countries receive their fair share of multinational transactions. Currently, developing countries' taxation rights are often overshadowed by the dominance of large companies, particularly those in the digital sector and certain wealthy countries.

## Pemeringkatan bank ke-lima Koalisi ResponsiBank Indonesia

The Fifth bank rating of the Indonesian ResponsiBank Coalition



### Laporan Pemeringkatan bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia

Bank Rating Report 2022: Measuring the Progress of Sustainable Financial Policies in the Banking Sector in Indonesia

Pada isu-isu pembangunan berkelanjutan, penelitian kami secara konsisten melihat kinerja perbankan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Berbagai penelitian terkait perbankan merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, terutama pada keuangan berkelanjutan. Kami juga ingin mengajak publik untuk mengetahui kemajuan sektor jasa keuangan dalam kebijakannya terkait Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST), dan berpartisipasi aktif untuk memberi catatan kritis mengenai kebijakan yang perlu

Our research on sustainable development issues consistently evaluates banking performance in implementing sustainable finance in Indonesia. This focus on banking-related studies underscores our dedication contributing to sustainable development, particularly in the realm of sustainable finance. We actively engage the public, encouraging them to learn about the progress of the financial services sector in adopting Environment, Social and Governance (ESG) policies. Furthermore, we encourage active participation by providing opportunities for critical feedback on policies that



ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan misi The PRAKARSA yaitu memproduksi dan mempromosikan wacana pengetahuan dan praktik kebijakan kesejahteraan dan melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai flag ship organisasi, The PRAKARSA menyelesaikan laporan penilaian kebijakan perbankan di Indonesia dalam integrasi aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola dalam praktik bisnisnya. Laporan penilaian kebijakan bank ini adalah kali kelima yang

require improvement. These initiatives aligned with The PRAKARSA's mission of fostering discourse on welfare policy knowledge and practice, as well as conducting research and studies in social policy, fiscal policy and sustainable development policy.

As the flagship organisation, The PRAKARSA completes banking policy assessment reports in Indonesia, integrating environmental, social, and governance aspects into its business practices. This report marks the fifth time assessment carried out by The PRAKARSA. Published In July 2023, this report was disseminated



dilakukan oleh The PRAKARSA. Pada Juli 2023, laporan ini dipublikasikan dan di diseminasikan dalam diskusi publik yang dihadiri oleh pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, bank, masyarakat umum, media dan organisasi masyarakat sipil.

in a public discussion attended by the government, academics, research institutions, banks, the general public, media and civil society organisations.

## Policy Brief Policy Briefs

### Kebijakan Ekonomi Economic Policy



**Edisi 37** Edition 37

#### **Hilangnya Penerimaan Negara dari Aliran Keuangan Gelap di Sektor Perikanan dan Batu Bara di Indonesia**

The loss of State Revenue from the illicit financial flows in the Fisheries and Coal Sectors in Indonesia



**Edisi 42** Edition 42

#### **Pajak Kekayaan untuk Mengatasi Distribusi Beban Pajak yang Asimetris**

Wealth Tax to Overcome Asymmetric Tax Burden Distribution

## Policy Brief Policy Briefs

### Kebijakan Sosial Social Policy



**Edisi 40** Edition 40

#### **Indeks Kemiskinan Multidimensi: Mengupas Jejak Kemiskinan Masyarakat**

Multidimensional Poverty Index: Unraveling the Traces of Poverty in Society



**Edisi 41** Edition 41

**Pasien Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out-of-pocket**

Cancer Patients in Indonesia Still Bearing Out-of-Pocket Costs

**Policy Brief** Policy Briefs

**Kebijakan Pembangunan dan Berkelanjutan** Sustainable Development



**Edisi 38** Edition 38

**Sengkarut Transisi Pembiayaan Bank dan Transisi Energi di Indonesia**

Bank Financing Transition and Energy Transition in Indonesia



**Edisi 39** Edition 39

**Kriteria Taksonomi Hijau Indonesia Harus Mencakup Tujuan Strategis Lingkungan dan Sosial**

Indonesian Green Taxonomy Criteria Must Include Environmental and Social Strategic Objectives



**Edisi 43** Edition 43

**Meninjau Kebijakan Keberlanjutan Bank di Indonesia: Apakah Sudah Cukup Serius?**

Review Sustainability Policy Banks in Indonesia: Are They Serious Enough?





**Edisi 44** Edition 44

**Pengungkapan Informasi dan Risiko Keberlanjutan Bank: Transparansi atas Keberlanjutan**

Information and Risk Disclosure Bank Sustainability: Transparency on Sustainability

**Beban biaya biaya out-of-pocket masih terjadi pada pasien kanker di Indonesia**

The burden of out-of-pocket costs still occurs among cancer patients in Indonesia



**Pasién Kanker di Indonesia Masih Menanggung Beban Biaya Out-of-pocket**

Cancer Patients in Indonesia Still Bearing Out-of-Pocket Costs

Isu jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu isu yang berusaha selalu kami angkat ke dalam diskusi publik. Isu kesehatan sendiri bahkan sudah menjadi pembahasan sejak awal berdirinya The PRAKARSA. Pada tahun 2023, kami mengangkat studi kasus pada permasalahan ketimpangan akses kesehatan untuk penanganan penyakit kanker di Indonesia. Kami melihat meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah menanggung pengobatan dan perawatan untuk pasien kanker, namun tidak semua jenis obat penyakit kanker ditanggung oleh JKN. Selain itu, pasien kanker juga ada harus melakukan pengobatan ke luar domisili tinggal mereka akibat tidak memadainya fasilitas kesehatan setempat. Hal-hal seperti ini kami lihat merupakan beberapa faktor yang menyebabkan pasien dan keluarganya mengalami beban finansial atau out-of-pocket (OOP) kesehatan.

The issue of national health insurance is one that we always strive to address in public discussions. Health concerns themselves have even been discussed since the inception of The PRAKARSA. In 2023, we raised a case study on the problem of inequality in access to cancer treatment in Indonesia. Even though the National Health Insurance (JKN) covers treatment and care for cancer patients, not all types of cancer drugs are in its coverage. Additionally, cancer patients often have to seek therapy outside their residences due to inadequate local health facilities. We see factors like these as significant contributors to the financial burdens experienced by patients and their families, resulting or out-of-pocket (OOP) health expenditures.



## Pajak kekayaan untuk distribusi beban pajak yang berkeadilan

Wealth tax for fair distribution of the tax burden



### Pajak Kekayaan untuk Mengatasi Distribusi Beban Pajak yang Asimetris

Wealth Tax to Overcome Asymmetric Tax Burden Distribution

Pada isu ekonomi, kami juga secara konsisten terus mendorong bagaimana pajak dapat lebih berkeadilan. Sejak tahun 2021, kami mulai mempromosikan segera aktif mengenai gagasan untuk menggali sumber pendapatan perpajakan selain menambah utang. Strategi yang kami usulkan kepada pemerintah salah satunya dengan melakukan mobilisasi sumber daya domestik melalui wealth tax (pajak kekayaan) kepada kelompok super kaya. Wealth tax sebenarnya bukanlah hal yang baru namun semakin menemukan relevansinya di tengah pandemi pada masa itu. Kemudian di tahun 2022 dan 2023 kami melanjutkan penelitian mengenai pajak kekayaan baik di Indonesia hingga potensi di tingkat ASEAN.

On economic matters, we consistently advocate for more equitable taxes. Since 2021, we have actively promoted the idea of exploring sources of tax revenue rather than relying solely on increased debt. One of the strategies we propose to the Government is mobilizing domestic resources through a wealth tax on the super-rich. While wealth tax is nothing new, it has gained increasing relevance amid the pandemic. In 2022 and 2023, we continued our research on wealth taxes in Indonesia and their potential at the ASEAN level.

## Transisi pembiayaan bank dan transisi energi di Indonesia

Bank financing transition and energy transition in Indonesia



### Pajak Kekayaan untuk Mengatasi Distribusi Beban Pajak yang Asimetris

Wealth Tax to Overcome Asymmetric Tax Burden Distribution

Kuangan berkelanjutan merupakan salah satu isu utama yang kami bahas. Isu keuangan berkelanjutan yang sangat terkait dengan perbankan. Kami juga melihat berdasarkan sektor-sektor yang perlu perhatian tinggi karena terkait dengan praktik pelanggaran HAM, lingkungan dan tata kelola yang buruk. Pada tahun 2023, kami mengangkat studi kasus melihat pembiayaan bank untuk energi bersih. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang telah menetapkan target pengurangan emisi dan mencapai net zero

Sustainable finance is one of the main issues we discuss, closely intertwined with banking. We also focus on sectors that require attention due to their connection to human rights violations, the environment and poor governance. In 2023, we highlighted a case study on bank financing for clean energy, aligning with Indonesia's commitment to reduce emissions and achieve net-zero emissions by 2060. To reach this target, financing commitments from multiple parties are needed. However, to date, bank



emission pada tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut tentu saja diperlukan komitmen pembiayaan dari multi pihak. Hanya saja, sampai saat ini keterlibatan bank dalam pembiayaan energi bersih masih rendah, hal ini antara lain disebabkan oleh tantangan dalam pembiayaan transisi energi dan serta persepsi bahwa pembiayaan energi terbarukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan energi fosil.

involvement in clean energy financing still needs to increase, partly due to funding challenges in the energy transition and the perception that financing renewable energy is less profitable than fossil energy.

### Opini Opinion

#### Kebijakan Ekonomi Economic Policy

Di tahun 2023, The PRAKARSA berhasil memproduksi sebanyak 10 opini media di berbagai isu. Jumlah ini naik jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 8 opini.

In 2023, The PRAKARSA succeeded in producing ten media opinions on various issues, an increase from eight opinions in 2022.



#### Menggagas Pajak Kekayaan Si Superkaya Initiating a Wealth Tax for the Super Rich

*Ditulis oleh Irvan Tengku Harja, terbit di Koran Tempo pada 19 Januari 2023*

*Written by Irvan Tengku Harja, published in Koran Tempo on January 19 2023*



#### How Indonesia is facing a huge loss in its fishery and coal trade

*Ditulis oleh Rizky Deco Praha di Jakarta Post pada 20 Februari 2023*

*Written by Rizky Deco Praha in the Jakarta Post on February 20 2023*



**Ketimpangan Pajak Pekerja dan Ultrakaya**  
**Tax Inequality of Workers and the Ultrarich**

*Ditulis oleh Irvan Tengku Harja, terbit di Koran Tempo pada 14 Juli 2023*

*Written by Irvan Tengku Harja, published in Koran Tempo on July 14 2023*

**Opini** Opinion

**Kebijakan Sosial** Social Policy



**Social Security for migrant workers: A drop in the bucket for workers risk protection**

*Ditulis oleh Victoria Fanggihdae dan Darmawan Prasetya, terbit di Jakarta Post pada 3 April 2023*

*Written by Victoria Fanggihdae and Darmawan Prasetya, published in the Jakarta Post on April 3 2023*



**Pentingnya program pensiun sosial: Karena lansia adalah tanggung jawab negara, bukan hanya anak cucu**

**The importance of social pension programs: Because the elderly are the responsibility of the state, not just children and grandchildren**

*Ditulis oleh Darmawan Prasetya, terbit di The Conversation pada 11 April 2023*

*Written by Darmawan Prasetya, published in The Conversation on April 11 2023*



**Pentingnya program pensiun sosial untuk lansia**  
**The importance of social pension programs for the elderly**

*Ditulis oleh Darmawan Prasetya, terbit di Koran Tempo pada 28 April 2023*

*Written by Darmawan Prasetya, published in Koran Tempo on April 28 2023*



**TheJakartaPost**

2 Juni 2023

**Multidimensional Poverty:  
Peeling off poverty layer by layer**



**Multidimensional Poverty: Peeling off poverty layer by layer**

Ditulis oleh Rizky Deco Praha dan Darmawan Prasetya, terbit di Jakarta Post pada 2 Juni 2023

Written by Rizky Deco Praha and Darmawan Prasetya, published in the Jakarta Post on June 2 2023

**THE CONVERSATION**

4 Juli 2023

**Perawatan paliatif pasien kanker di rumah kurang dukungan, apa yang harus pemerintah lakukan?**



**Perawatan paliatif pasien kanker di rumah kurang dukungan, apa yang harus pemerintah lakukan?**

Palliative care for cancer patients at home lacks support; what should the Government do?

Ditulis oleh Aqilatul Layyinah, terbit di The Conversation pada 4 Juli 2023

Written by Aqilatul Layyinah, published in The Conversation on July 4 2023

**MELBOURNE  
ASIA REVIEW**

4 Juli 2023

**Three reasons social insurance coverage in Indonesia is low**



**Three reasons social insurance coverage in Indonesia is low**

Ditulis oleh Victoria Fanggidae, terbit di Melbourne Asia Review, Edisi 3, Juni 2023.

Written by Victoria Fanggidae, published in Melbourne Asia Review, Issue 3, June 2023

**Opini** Opinion

**Kebijakan Pembangunan dan Berkelanjutan** Sustainable Development

**KORAN TEMPO**

23 Mei 2023

**Pembiayaan Bank untuk Transisi Energi**



**Pembiayaan Bank untuk Transisi Energi**

Bank Financing for the Transition Energy

Ditulis oleh Irvan Tengku Harja, terbit di Koran Tempo pada 23 Mei 2023

Written by Irvan Tengku Harja, published in Koran Tempo on May 23 2023





# Breaking News



## Opini The PRAKARSA paling banyak di seputar isu-isu sosial

The PRAKARSA's opinions predominantly focus on social issues.



Salah satu opini yang ditulis oleh The PRAKARSA merespon kebijakan pemerintah mengenai jaminan sosial bagi pekerja migran. The PRAKARSA mengkritisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 tahun 2023 mengenai jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Peraturan ini telah meniadakan peran pemberi kerja dalam perlindungan pekerja migran. Dalam aturan tersebut, pekerja merupakan satu-satunya pihak yang wajib membayar iuran, sedangkan pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, pekerja migran mungkin menghadapi tantangan teknis dalam mengakses manfaat di luar negeri karena pemerintah Indonesia belum mendirikan kantor jaminan sosial di luar negeri, bahkan di negara-negara seperti Singapura atau Malaysia yang menampung jumlah pekerja migran Indonesia terbesar.

One such opinion addressed the Government's policy concerning social security for migrant workers. The PRAKARSA criticises the Minister of Manpower Regulation no. 4 of 2023 which pertains to social security for Indonesian migrant workers. This regulation abolishes the role of employers in protecting migrant workers. According to this regulation, workers are solely responsible for making contributions, while employers have no such obligation. Furthermore, migrant workers may encounter technical challenges in accessing benefits abroad since the Indonesian Government has not established social security offices overseas, even in countries like Singapore or Malaysia, which host a large number of Indonesian migrant workers.





### » 3. The PRAKARSA dalam Kebijakan Publik Indonesia

#### The PRAKARSA in Indonesian Public Policy

MISI

1

Memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan dan praktik kebijakan kesejahteraan (welfare regime).

Produce and promote policy discourse, knowledge and welfare practice policy (welfare regime).

- Berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, berdialog secara konstruktif untuk mengintegrasikan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) dalam mengukur kemiskinan di Indonesia
- OJK menerima masukan dari Koalisi ResponsiBank Indonesia terkait draft consultative paper taksonomi berkelanjutan Indonesia dan menyambut masukan dari ResponsiBank Indonesia mengenai perlunya integrasi aspek sosial secara lebih komprehensif, utamanya terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender dan penerapan prinsip berkeadilan dalam transisi energi.
- Pemprov DKI Jakarta mengadopsi IKM sebagai indikator yang harus diukur atas rencana program Bansos yang akan dilakukan pada 2024
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan laporan riset kelanjutusiaan The PRAKARSA sebagai rujukan untuk penyusunan naskah akademik Peraturan Gubernur Kesejahteraan Lansia di Jawa Barat.
- Various stakeholders, including representatives from civil society organisations, academics, ministries/institutions, and local governments, are had constructive dialogue to integrate the Multidimensional Poverty Index (MPI) in measuring poverty in Indonesia.
- The Financial Authority Service (OJK) received and welcomed input from the ResponsiBank Indonesia Coalition on the consultative paper draft concerning Indonesia's sustainable taxonomy, and on the need of more comprehensive integration of social aspects, especially related to human rights and gender equality and just principles implementation in the energy transition.
- The DKI Jakarta Provincial Government has adopted MPI as an indicator that must be measured in the planned social assistance program, which will be implemented in 2024.
- The West Java Provincial Government used The PRAKARSA's research report on the elderly as a reference for preparing the academic text for the Governor's Regulation on the Welfare of the Elderly in West Java.

MISI  
2

Melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Conduct research and studies in the fields of social policy, fiscal policy and sustainable development policy.

- Asimetri Sistem Perpajakan dan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem perpajakan pada ketiga negara tersebut sudah adil dan progresif atau masih asimetris bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi atas dan bawah, sekaligus menggali potensi dan peluang atas penerapan pajak kekayaan di negara-negara tersebut. Pemetaan sistem perpajakan yang asimetris ini juga menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem perpajakan yang ada sehingga penerapan pajak kekayaan yang diusulkan dapat disertakan dalam peraturan perpajakan.
- Riset Insentif Fiskal dan Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan ASEAN: Penilaian Implementasi Uji Tuntas HAM (HRDD) Kerangka bisnis yang inklusif yang menjadi mandat di ASEAN merupakan langkah untuk melindungi proses bisnis yang adil di semua rantai pasok. Sesuai dengan misi The PRAKARSA yaitu memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan serta melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, The PRAKARSA melakukan riset yang bertujuan untuk mengidentifikasi insentif fiskal yang diberikan di Indonesia, Vietnam, dan Thailand kepada perusahaan pengolahan ikan, untuk menilai pemenuhan HAM di sektor pengolahan ikan, dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. The PRAKARSA melakukan riset ini untuk
- Tax System Asymmetry and Potential Wealth Tax Revenue in Indonesia, the Philippines, and Vietnam. This research aims to determine whether the taxation system in these three countries is fair and progressive or still asymmetrical for individuals across different economic level. It also seeks to explore the potential and opportunities for implementing wealth taxes in these countries. This mapping of the asymmetric tax system will outline the advantages and disadvantages of the existing tax system, facilitating the inclusion of the proposed wealth tax in tax regulations.
- Research on Fiscal Incentives and Human Rights in the ASEAN Fisheries Industry: Assessment of the Implementation of Human Rights Due Diligence (HRDD) The inclusive business framework mandated in ASEAN represents a crucial step toward safeguarding fair business practices across all supply chains. Aligned with the initiative's mission of fostering discourse, knowledge and practice of welfare policies as well as conducting research and studies in the realms of social policy, fiscal policy and sustainable development policy, The PRAKARSA conducted research aimed at identifying fiscal incentives provided to fish processing companies in Indonesia, Vietnam, and Thailand. The research further sought to assess human rights compliance in the fish processing sector, and provide policy recommendations to stakeholders. The PRAKARSA conducted this study to offer a novel contribution to understanding the impact of fiscal incentives on human rights.





memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai dampak insentif fiskal terhadap HAM.

- The PRAKARSA melakukan riset mengenai Out of Pocket (OOP) pasien kanker dengan studi kasus di DKI Jakarta, yang memberikan insight mengenai sejauh mana pasien kanker dari berbagai daerah di Indonesia bertahan selama didiagnosis dan menjalani treatment di rumah-rumah sakit rujukan pusat.
- The PRAKARSA conducted research on out-of-pocket OOP expenses of cancer patients with a case study in DKI Jakarta. This study offers insights into the survival rates of cancer patients from different regions in Indonesia who are diagnosed and undergo treatment at central referral hospitals.

### MISI 3

#### Menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan.

Organise capacity development, education, and training for stakeholders.

- Adanya MoU antara The PRAKARSA dan LPPSP-UI untuk mengadakan Pelatihan Penulisan Policy Brief.
- IPB (dosen dan mahasiswa) menerima peningkatan kapasitas dari The PRAKARSA dalam Pelatihan Penulisan Policy Brief.
- BPS menerima peningkatan kapasitas dari The PRAKARSA untuk penulisan policy brief dalam Workshop Penjaminan Kualitas Publikasi.
- Mahasiswa UNS Solo menerima Kuliah Praktisi Prodi Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret "Sosiologi Pembangunan" dari The PRAKARSA.
- Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial, FISIP UI menerima kuliah umum dari The PRAKARSA mengenai isu kelanjutusiaan.
- MoU between The PRAKARSA and LPPSP-UI to hold Policy Brief Writing Training is in place.
- IPB (lecturers and students) built their capacity through Policy Brief Writing Training organized by The PRAKARSA.
- BPS built their capacity on writing policy briefs in the Publication Quality Assurance Workshop organized by The PRAKARSA.
- UNS Solo students received a Practitioner Lecture in the FISIP Sociology Study Program at Sebelas Maret University "Sociology of Development" from The PRAKARSA.
- Students from the Department of Social Affairs, FISIP UI, received a public lecture from The PRAKARSA regarding the issue of the elderly.

MISI



MISI  
4

**Mengembangkan jejaring antar think tank, CSO dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan.**

Develop networks between think tanks, CSOs, and the private sector to initiate policy reform.

- Kerja sama dengan AP2HI dalam pengarusutamaan bisnis yang inklusif di sektor perikanan di Indonesia serta berkolaborasi dalam riset fiscal incentive dan HRDD di Sulawesi Utara
- The PRAKARSA bersama dengan Oxfam Novib, Oxfam Vietnam, Oxfam Indonesia dan VESS Vietnam bersama-sama menyusun concept note untuk pengembangan jaringan think tank progresif di ASEAN
- The PRAKARSA menjadi mitra Sheffiled University dan mengajukan 2 proposal riset bersama yang diajukan kepada lembaga riset yang berada di bawah pemerintah Inggris dan EU dalam isu social care.
- Collaboration with AP2HI in mainstreaming inclusive business in the fisheries sector in Indonesia and collaborating on fiscal incentive and HRDD research in North Sulawesi
- A joint initiative with Oxfam Novib, Oxfam Vietnam, Oxfam Indonesia and VESS Vietnam to draft a concept note for the development of a progressive think tank network in ASEAN.
- The PRAKARSA is partnering with Sheffiled University and submitted 2 joint research proposals to UK and EU governments on social care issues.





## » 4. Pengembangan unit bisnis Business unit development



Pada tahun 2021, The PRAKARSA menjalankan Program BUILD (Building Institutions and Networks) yang bertujuan untuk membantu lembaga non-pemerintah seperti The PRAKARSA untuk mulai melepaskan ketergantungan secara finansial terhadap hanya satu jenis sumber pendanaan (misalnya donor/lembaga kerja sama pembangunan internasional). Dari sisi The PRAKARSA, jika bisa menjadi lebih mandiri secara keuangan, ini artinya The PRAKARSA dapat lebih fleksibel dalam menentukan agenda penelitian dan kerja-kerja advokasi lembaga. Dengan demikian, agenda The PRAKARSA akan menjadi lebih independen dan tidak tergantung pada tren di dunia donor internasional, tetapi juga bisa lebih membumi dan berdasarkan pada tren dan kenyataan empiris di Indonesia atau di regional. Saat ini, The PRAKARSA mulai melakukan kerja-kerja di bidang konsultasi di dalam negeri dengan mekanisme kerja sama antar lembaga atau kontrak (swakelola) dengan pemerintah dalam rangka diversifikasi pendanaan.

Pendirian unit bisnis The PRAKARSA adalah bagian penting dari upaya penguatan lembaga yang diamanatkan oleh Program BUILD Ford Foundation, khususnya untuk diversifikasi pendapatan lembaga. Saat ini, pendanaan The PRAKARSA semuanya masih bersumber dari pendanaan bersyarat dari pemberi dana (donor), dan perlu mendapatkan perhatian agar The PRAKARSA memiliki sumber pendapatan lain demi keberlanjutan dan independensi kerja-kerja lembaga.

In 2021, The PRAKARSA is running the BUILD (Building Institutions and Networks) Program, which aims to help non-governmental institutions, including itself, to reduce reliance on a single funding source such as donors or international development cooperation institutions. From The PRAKARSA's perspective, achieving greater financial independence would provide flexibility in determining the institution's research agenda and advocacy works. This approach would enable The PRAKARSA to develop an agenda that is more autonomous, less influenced by international donor's trends, and more grounded in empirical realities in Indonesia or the region. Currently, The PRAKARSA has begun engaging in consultancy work within the country, establishing cooperative mechanisms with other institutions or entering into contracts (self-management) with the Government as part of its efforts to diversify funding.

The establishment of The PRAKARSA's business unit marks a significant step in the institutional strengthening efforts outlined by the Ford Foundation's BUILD Program, specifically aimed at diversifying institutional revenues. Currently, all of The PRAKARSA's funding is contingent upon conditional funding from donors, highlighting the necessity to explore alternative income sources for the sustainability and independence of the institution's endeavours.





Pada tahun 2023, The PRAKARSA bekerja sama dengan LPPSP FISIP UI menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari di ruangan pelatihan LPPSP FISIP UI dan diikuti sebanyak 30 orang peserta.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis kebijakan dan berpikir analitis atas pemecahan masalah terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kami berupaya melakukan pengarusutamaan bagi pembuatan kebijakan untuk membuat kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy making.

Dalam pelatihan ini, beberapa isu penting kami cakup, di antaranya mengenai pendekatan berbasis bukti (evidence-based policymaking/EBP) dalam pembuatan kebijakan, di mana data menjadi sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan, termasuk data kuantitatif/statistik dan naratif-deskriptif yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari sumber primer dan sekunder. Kami mengaitkannya dengan penyusunan Policy Brief sebagai pilihan penyampaian alternatif kebijakan atau sebagai solusi atas suatu masalah, di mana data dan argumen disampaikan secara ringkas dan jelas. Policy brief penting karena digunakan untuk advokasi kebijakan dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya.

In 2023, The PRAKARSA, have collaborated with LPPSP FISIP UI, conducted a one-day training session on policy analysis and policy brief writing. The event, held in the LPPSP FISIP UI's training room, was attended by 30 participants.

This training aims to enhance participants' skills in policy analysis and analytical thinking concerning solving problems regarding social, political and economic issues. The aim was to promote evidence-based policymaking by mainstreaming policymaking processes.

During the training, we covered several important issues, including the evidence-based approach (also known as evidence-based policymaking/EBP) in policymaking. This approach emphasizes the use of data as the primary source of information for decision-making, encompassing both quantitative/statistical and narrative-descriptive data sourced from scientifically validated primary and secondary sources. We also delved into the preparation of Policy Briefs, which serve as concise and clear presentations of alternative policies or as a solution to problem. Policy briefs play a vital role in policy advocacy and facilitating dialogue between the Government and other stakeholders.



## » 5. Kerja sama multi pihak Multi-party collaboration

Pada tahun 2023, The PRAKARSA bekerja sama dengan beberapa lembaga donor lewat berbagai program antara lain:

In 2023, The PRAKARSA have collaborated with several donor agencies through various programs, including:

### Ford Foundation

#### Ford Foundation

Program BUILD (Building Institutions and Networks)  
BUILD (Building Institutions and Networks) program



OXFAM

#### OXFAM (SIDA)

Program Fair Finance Asia | Fair Finance Asia program



OXFAM

#### OXFAM

Program Fair for All dan thinktank network development ASEAN  
Fair for All program and ASEAN development network thinktank



RAINFOREST  
ACTION NETWORK

#### Rainforest Action Network

Program sustainable finance | Sustainable finance program



KONEKSI  
Knowledge Partnership Platform  
Australia - Indonesia

#### KONEKSI (DFAT/Cowater) via RDI dan CDU

Riset perlindungan sosial adaptif  
Adaptive social protection research



LOW CARBON  
DEVELOPMENT  
INDONESIA

#### Oxford Policy Management (FCDO UK)

Program Low-Carbon Development Initiative  
Low-Carbon Development Initiative programme



FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG

#### FES Indonesia

Kajian Jaminan Pensiun untuk pekerja mandiri  
Study of Pension Security for self-employed workers



Tahun ini The PRAKARSA berjejaring sejumlah lembaga melalui sejumlah aktivitas.

This year, The PRAKARSA is networking with a number of institutions through several activities.



### MoU dengan KND (Komisi Nasional Disabilitas) tentang pembangunan yang inklusif disabilitas

MoU with KND (National Commission on Disabilities) regarding disability-inclusive development



### MoU dengan LPPSP UI tentang pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief

MoU with LPPSP UI regarding training in policy analysis and writing policy briefs



### Kerja sama dengan Pemda DKI pembuatan dokumen perencanaan tahunan, pembuatan portal satu data pengentasan kemiskinan ekstrem dan kebijakan disabilitas

The cooperation with the DKI Regional Government involves the creation of annual planning documents, the establishment of a unified data portal for extreme poverty alleviation, and disability policy formulation.



### Kerja sama dengan CTSS IPB, menyelenggarakan Public Lecture Keuangan Berkelanjutan

In collaboration with CTSS IPB, held a Public Lecture on Sustainable Finance



### Kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat melakukan pendampingan pembuatan Peraturan Gubernur Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat

Collaboration with the Government of West Java to assist in the creation of the Governor's Regulations on the Age of West Java Province

**Kerja sama dengan Central Institute for Economic Management (CIEM) Vietnam**

Collaboration with the Central Institute for Economic Management (CIEM) Vietnam

**Kerja sama dengan Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS)**

Collaboration with Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies (VESS)

Selain itu The PRAKARSA juga bekerja sama secara lebih cair dan luas dengan berbagai jaringan OMS, think-tank dan universitas baik dalam maupun luar negeri, baik dalam konsorsium riset, mengadakan kegiatan bersama maupun koalisi untuk advokasi. Tahun ini The PRAKARSA pertama kali bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti:

- CTSS IPB (seminar peningkatan kesadaran publik mengenai keuangan berkelanjutan)
- Follow the Money (dukungan advokasi PLTU Cirebon)
- Sheffield University (tim riset social care aging population)
- Charles Darwin University (CDU) dan Resilience Development Initiative (RDI) –dalam konsorsium riset isu perlindungan sosial adaptif.
- Pemprov Jawa Barat (pertama kali bekerjasama secara langsung dalam penyusunan kebijakan lansia)
- BRIN (diskusi mengenai indeks kesenjangan dunia)
- BRIDA Jawa Tengah (diskusi mengenai kemiskinan multidimensi)
- KND – Komisi Nasional Disabilitas (kerjasama advokasi kebijakan disabilitas)
- Working Group on International Financial Institution (inisiasi IESR)

Apart from that, The PRAKARSA also collaborates more fluidly and broadly with various CSO networks, think tanks and universities both at home and abroad, engaging in research consortia, joint activities and advocacy coalitions. This year, The PRAKARSA collaborated for the first time with several institutions, such as:

- CTSS IPB (seminar to increase public awareness regarding sustainable finance)
- Follow the Money (Cirebon PLTU advocacy support)
- Sheffield University (social care ageing population research team)
- Charles Darwin University (CDU) and the Resilience Development Initiative (RDI) are part of a research consortium on adaptive social protection issues.
- West Java Provincial Government (first time collaborating directly in formulating elderly policy)
- BRIN (discussion regarding the world inequality index)
- BRIDA Central Java (discussion on multidimensional poverty)
- KND – National Commission on Disabilities (disability policy advocacy collaboration)
- Working Group on International Financial Institutions (IESR initiation)

- Jikalahari (riset kolaboratif isu ESG sektor pulp & paper)
- CIEM Vietnam (riset HAM di sektor perikanan)
- AP2HI (informan kunci dalam riset HAM dalam sektor perikanan)
- DFW -Destructive Fishing Watch (informan kunci dalam riset HAM di sektor perikanan)
- KI -Konservasi Indonesia (reviewer dalam riset HAM di sektor perikanan)
- Jikalahari (collaborative research on ESG issues in the pulp & paper sector)
- CIEM Vietnam (human rights research in the fisheries sector)
- AP2HI (key informant in human rights research in the fisheries sector)
- DFW -Destructive Fishing Watch (key informant in human rights research in the fisheries sector)
- KI - Indonesian Conservation (reviewer in human rights research in the fisheries sector)





| 03

# Transparansi dan Akuntabilitas

## Transparency and Accountability

**Kami secara konsisten melakukan audit baik audit organisasi maupun audit berdasarkan proyek. Audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.**

We consistently conduct audits, including organisational audits and project-based audits. These audits are carried out by Public Accounting Firms aligned with Financial Accounting standards in Indonesia.





## » 1. Ringkasan kinerja keuangan The PRAKARSA Summary of The PRAKARSA's financial performance



2022

- |   |  |
|---|--|
| 1. Audit Organisasi Tahun Buku 2020   | 1. Organisational Audit for Fiscal Year 2020                                   |
| 2. Audit Proyek:<br>- Proyek Responsi bank/FFA 2021<br>- Proyek Hivos-Voice | 2. Project Audit:<br>- Bank Response Project/FFA 2021<br>- Hivos-Voice Project |



2023

- |   |  |
|---|--|
| 1. Audit Organisasi Tahun Buku 2021   | 1. Organisational Audit for Fiscal Year 2021   |
| 2. Audit Organisasi Tahun Buku 2022   | 2. Organisational Audit for Fiscal Year 2022   |
| 3. Audit Proyek: Proyek Responsi bank/ FFA 2022   | 3. Project Audit: Bank Response Project/ FFA 2022  |
| 4. Asistensi Pelaporan SPT Masa PPh 21 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022 - Bpk. Hadi Prayitno          | 4. Assistance with reporting Periodic Income Tax Returns 21 and Annual Corporate Income Tax Returns 2022 - Mr. Hadi Prayitno |
| 5. Pelatihan Perpajakan PPh 21 - Re-Search  | 5. PPh 21 Taxation Training - Re-Search  |
| 6. Workshop Anti Corruption - Oxfam in Indonesia  | 6. Anti Corruption Workshop - Oxfam in Indonesia   |
| 7. Pelatihan "Kupas Tuntas ISAK 35 & Pengelolaan Keuangan Strategis untuk Organisasi Non Laba - Re-Search | 7. Training "Completely Examine ISAK 35 & Strategic Financial Management for Non-Profit Organizations - Re-Search            |
| 8. Pendampingan pemutakhiran SOP Keuangan - Re-Search   | 8. Assistance in updating Financial SOPs - Re-Search   |

## » 2. Hasil audit Audit results

Laporan keuangan terlampir menyajikan secara “wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan The PRAKARSA tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The attached financial report “fairly presents in all fairly material respects”, the financial position of The PRAKARSA Association as of December 31, 2023, as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2023 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As Of December 31, 2023 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2023	Catatan/ Notes	2022
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>			<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	8.877.328.278	3b,4	6.467.261.228 <i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang	325.699.693	5	453.397.806 <i>Account receivables</i>
Uang muka	230.735.176	6	15.000.000 <i>Advances</i>
Biaya dibayar dimuka	-	7	3.703.384 <i>Prepaid expenses</i>
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>9.433.763.147</b>		<b>6.939.362.418</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap	11.671.160	3f,8	26.208.999 <i>Fixed assets</i>
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>11.671.160</b>		<b>26.208.999</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>9.445.434.307</b>		<b>6.965.571.417</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>			<b>LIABILITIES AND NET ASSETS</b>
<b>LIABILITAS LANCAR</b>			<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang program	667.500.862	9	779.296.508 <i>Project payable</i>
Biaya yang masih harus dibayar	400.624.659	10	105.958.395 <i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	24.246.096	11a	24.755.205 <i>Tax payable</i>
<b>TOTAL LIABILITAS LANCAR</b>	<b>1.092.371.617</b>		<b>910.010.108</b>
<b>ASET BERSIH</b>			<b>NET ASSETS</b>
Aset bersih terikat	3.158.865.096	3c	269.962.194 <i>Restricted Net Assets</i>
Aset bersih tidak terikat	5.194.197.594	3c	5.785.599.115 <i>Unrestricted Net Assets</i>
<b>TOTAL ASET BERSIH</b>	<b>8.353.062.690</b>		<b>6.055.561.309</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>	<b>9.445.434.307</b>		<b>6.965.571.417</b>

### PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME  
For The Year Ended December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
<b>PENERIMAAN</b>				<b>RECEIPT</b>
Dengan pembatasan	11.459.753.271	3d,12	8.723.711.167	Restricted
Tanpa pembatasan	1.412.181.049	3d,12	2.749.914.123	Unrestricted
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>12.871.934.320</b>		<b>11.473.625.290</b>	<b>TOTAL RECEIPT</b>
<b>BIAYA</b>				<b>EXPENSES</b>
Biaya - biaya program dengan pembatasan	-	3d,13a	15.726.809.509	Program expenses with restrictions
Biaya - biaya program tanpa pembatasan	11.006.756.611	3d,13b	1.148.529.620	Program expenses with no restrictions
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>11.006.756.611</b>		<b>16.875.339.129</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>1.865.177.709</b>		<b>(5.401.713.839)</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>
Pendapatan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
<b>TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>	<b>1.865.177.709</b>		<b>(5.401.713.839)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>

### PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGING NET ASSET  
For The Year Ended December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber daya:			<i>Restricted From Donor:</i>
Saldo awal	269.962.194	7.820.442.067	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian aset neto	432.323.672	(547.381.531)	<i>Net asset adjustments</i>
Pendapatan komprehensif tahun berjalan	11.459.753.271	(7.003.098.342)	<i>Comprehensive income for the year</i>
Reklasifikasi Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(9.003.174.041)	-	<i>Reclassification of net assets which released from restrictions</i>
Saldo akhir	3.158.865.096	269.962.194	<i>Ending balance</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Jumlah</b>	<b>3.158.865.096</b>	<b>269.962.194</b>	<b>Total</b>
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber daya:			
Saldo awal	5.785.599.115	4.184.214.612	<i>Beginning balance</i>
Pendapatan Komprehensif tahun berjalan	(9.594.575.562)	1.601.384.503	<i>Comprehensive income for the year</i>
Reklasifikasi Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	9.003.174.041	-	<i>Reclassification of net assets which released from restrictions</i>
Saldo akhir	5.194.197.594	5.785.599.115	<i>Ending Balance</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Jumlah</b>	<b>5.194.197.594</b>	<b>5.785.599.115</b>	<b>Total</b>
<b>Jumlah Aset Neto</b>	<b>8.353.062.690</b>	<b>6.055.561.309</b>	<b>Total Net Assets</b>



## PERKUMPULAN PRAKARSA

LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS  
For the Year Ended  
December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Perubahan dalam aset bersih	1.865.177.709	(5.401.713.839)	<i>Changing on net assets</i>
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih:			<i>Adjustment for reconcile net assets to cash flow:</i>
Penyusutan	14.537.838	17.976.212	<i>Depreciation</i>
Koreksi laba ditahan	432.323.672	(547.381.531)	<i>Correction retained earning</i>
<b>PERUBAHAN ASET DAN LIABILITAS OPERASI</b>			<b>CHANGE IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES</b>
Piutang	127.698.113	396.195.396	<i>Account receivables</i>
Uang muka	(215.735.176)	39.283.900	<i>Advance</i>
Biaya diterima dimuka	3.703.384	(3.703.384)	<i>Prepaid expenses</i>
Biaya yang masih harus dibayar	294.666.264	(561.580.443)	<i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	(111.795.646)	-	<i>Other payables</i>
Utang pajak	(509.108)	(46.115.499)	<i>Taxes payables</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>2.410.067.050</b>	<b>(6.107.039.188)</b>	<b>Net cash flows used in operating activities</b>
<b>Penurunan kas dan setara kas</b>	<b>2.410.067.050</b>	<b>(6.107.039.188)</b>	<b>Decrease in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	<b>6.467.261.228</b>	<b>12.574.300.416</b>	<b>Cash and cash equivalent at beginning of the years</b>
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>8.877.328.278</b>	<b>6.467.261.228</b>	<b>Cash and cash equivalent at the end of the years</b>

### » 3. Kepatuhan dengan regulasi dan standar yang relevan Compliance with relevant regulations and standards



#### Kepatuhan Hukum

1. Pemenuhan kewajiban pemotongan & pelaporan perpajakan PPh 21 dan PPh Badan (Masa & Tahunan)
  2. Semua staf diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan yang menjadi wajib dari Pemerintah
1. Fulfilment of tax withholding & reporting obligations for PPh 21 and Corporate Income Tax (Periodic & Annual)
  2. All staff are covered in two mandatory programs from the Government; BPJS Health & BPJS Employment.

#### Financial Regulations

1. Tantangan untuk memenuhi kepatuhan penyelesaian Uang Muka dalam 14 hari kerja serta beragamnya dokumen pendukung yang dimintakan oleh donor dalam pelaporan keuangan
  2. Pelaksanaan audit organisasi yang dilakukan setiap tahun
1. Challenges in meeting compliance with Down Payment Settlement within 14 working days as well as various supporting documents requested by donors in financial reporting
  2. Implementation of organisational audits carried out every year





FAIR FINANCE ASIA

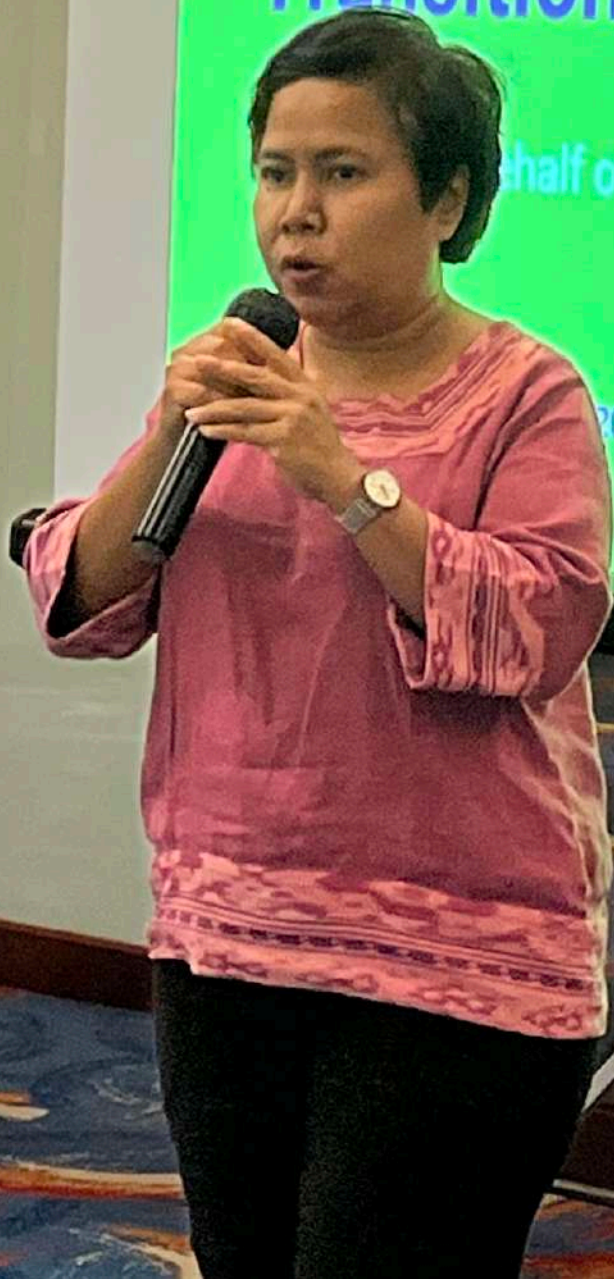
ResponsiBank  
Indonesia

Profu

# Financing a Just Energy Transition

Chief of Reponsibank Indonesia

2023





| 04

# Rencana dan Inisiatif Tahun 2024

## Plans and Initiatives for 2024

**Tahun 2024 mendatang dapat menjadi momentum baru bagi organisasi masyarakat sipil atau think-tank. Di mana tahun 2024 merupakan era kepemimpinan presiden yang baru.**

The year 2024 presents a new opportunity for civil society organisations or think tanks, especially with the advent of new presidential leadership.







Kerja The PRAKARSA bukan hanya di domestik tapi sudah bergerak di regional, begitu juga dengan mitra kerja kami juga bukan hanya nasional tapi juga di tingkat regional dan global. Ini sudah mendekati Visi The PRAKARSA untuk menjadi lembaga kajian dan pengembangan kapasitas berstandar internasional yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

The scope of PRAKARSA's work extends beyond domestic borders, with activities expanding regionally. Our network of partners, similarly transcends national boundaries, operating at regional and global levels. This trajectory aligns closely with The PRAKARSA's vision to evolve into an internationally recognized research and capacity development institution, leading the way in generating innovative and transformative ideas to realise socio-economic justice and prosperity.

**Di tahun 2023, kami berhasil memperluas jangkauan dan pelayanan dari nasional ke level global seperti kolaborasi penelitian-penelitian di tingkat regional bersama dengan lembaga think-tank di Vietnam, Thailand dan Filipina.**

In 2023, achieved significant milestones in broadening our reach and services from a national to a global level scale. For instance, we engaged in collaborative research at the regional level with think-tanks in Vietnam, Thailand and the Philippines.



Di level domestik, kami akan memperkuat hubungan dengan berbagai stakeholders. Kami akan berusaha untuk mengangkat isu-isu sosial ekonomi yang sebelumnya tidak banyak dibicarakan, agar mulai mendapatkan perhatian publik dan pengambil kebijakan via berbagai media. Berbagai publikasi The PRAKARSA meningkat pengaruhnya dan semakin banyak dikutip oleh kalangan akademisi. Kepercayaan dan pelibatan pemerintah dalam perencanaan dokumen kebijakan semakin meningkat kepada The PRAKARSA. Hanya saja, The PRAKARSA masih harus meningkatkan kerja sama dengan salah satu stakeholders yang juga merupakan target advokasi yakni dengan private sector. Kami telah melaksanakan capacity building, penelitian kolaboratif dan pelibatan langsung dalam berbagai kegiatan diskusi publik. Namun, engagement The PRAKARSA kepada private sector masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan strategi lainnya karena memang karakteristik yang berbeda dengan pemerintah dan stakeholders lainnya.

Peluang kerja sama ke depan yang dapat dibangun yakni dengan memberikan

At the domestic level, we aim to strengthen our relationships with various stakeholders. Our efforts will focus on raising socio-economic issues that have received limited attention, thereby garnering the interest of both the public and policymakers through various media channels. The influence of The PRAKARSA's publications continues to grow, with increasing citations from academic circles. Moreover, there is a rising level of trust and involvement from the Government in planning policy documents with The PRAKARSA. However, one of our challenges lies in enhancing cooperation with the private sector, which is also an advocacy target. While we've undertaken capacity building, engaging with the private sector remains a challenge due to differing characteristics compared to the Government and other stakeholders, therefore alternative strategies are needed necessary to address this gap.

Opportunities for future cooperation can be cultivated by overinsistence to regional governments in Indonesia. Currently, the



pendampingan kepada pemerintah daerah di Indonesia. Saat ini pemerintah daerah yang telah melibatkan The PRAKARSA secara langsung yakni Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Ke depannya, peluang kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dapat dilakukan. Pencapaian SDGs tahun 2030 dan berbagai target nasional dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak salah satunya think-tank yang dapat memberikan masukan atas rencana pembangunan daerah.

Untuk memitigasi risiko atas tantangan yang muncul, The PRAKARSA perlu melakukan penyeimbangan antara pengembangan jejaring eksternal dengan peningkatan kapasitas internal. Secara internal seluruh staf dituntut untuk mampu lebih adaptif dan efektif dalam bekerja. Selain itu, salah satu hal yang juga perlu dilakukan yakni dengan membuat perencanaan regenerasi atau kaderisasi organisasi. Ini merupakan salah satu upaya memastikan keberlanjutan organisasi. Kemudian, The PRAKARSA juga akan memperkuat branding organisasi dengan mengembangkan isu inovatif yang dapat diangkat kepada publik sebagai diskursus wacana. Hal ini sesuai dengan visi organisasi untuk menjadi lembaga riset dan pengembangan kapasitas yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

Tahun 2024 mendatang dapat menjadi momentum baru bagi organisasi masyarakat sipil atau think-tank. Di mana tahun 2024 merupakan era kepemimpinan presiden yang baru. Secara kelembagaan The PRAKARSA perlu terus memastikan keberlangsungan advokasi kebijakan dan keterlibatan dalam penyusunan kebijakan nasional seperti di dalam RPJMN dan RPJMD.

regional governments directly engaged with The PRAKARSA are DKI Jakarta Province and West Java Province. However, there are potential opportunities for collaboration for other regional governments in the future. Achieving the Sustainable Development Goals SDGs by 2030 and various national targets poses challenge for regional governments. Hence, collaboration among various stakeholders is essential, with think tanks playing a pivotal role in providing input on regional development plans.

To address the risks posed by emerging challenges, The PRAKARSA needs to strike a balance between expanding its external networks and enhancing internal capacity. Internally, it's imperative for all staff to be more adaptive and effective in their work. Additionally, planning for organizational regeneration or cadre formation is essential to ensure the long-term sustainability of the organisation. Furthermore, The PRAKARSA will focus on strengthening its branding by developing innovative issues that can stimulate public discourse. This aligns with the organisation's vision to become a leading research and capacity development institution, dedicated to pioneering innovative and transformative ideas aimed socio-economic justice and prosperity.

The year 2024 presents a new opportunity for civil society organisations or think tanks, especially with the advent of new presidential leadership. Institutionally, The PRAKARSA must prioritize to ensuring the continuity of policy advocacy and active involvement in the formulation of national policies, such as in the RPJMN (National Medium-Term Development Plan) and RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan).





RAPAT KOORDINASI TEKNIS  
**PERCEPATAN  
PENURUNAN  
STUNTING  
TAHUN 2023**

Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Aksi Nyata Percepatan Penurunan Stunting untuk Mencapai Target Tahun 2024

4 - 7 OKTOBER 2023



| 05

# Media Engagement dan Public Relations

## Media Engagement and Public Relations

Sepanjang tahun 2023, The PRAKARSA mengalami peningkatan sebagai rujukan. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah indikator seperti unduhan atas produk-produk yang telah dihasilkan oleh The PRAKARSA, kutipan di media masa dan kutipan di sejumlah jurnal, buku atau penelitian.

Throughout 2023, The PRAKARSA witnessed a notable increase in referrals, as evidenced by various indicators such as downloads of its produced materials, mentions in mass media, and citations in a number of journals, books, and research papers.



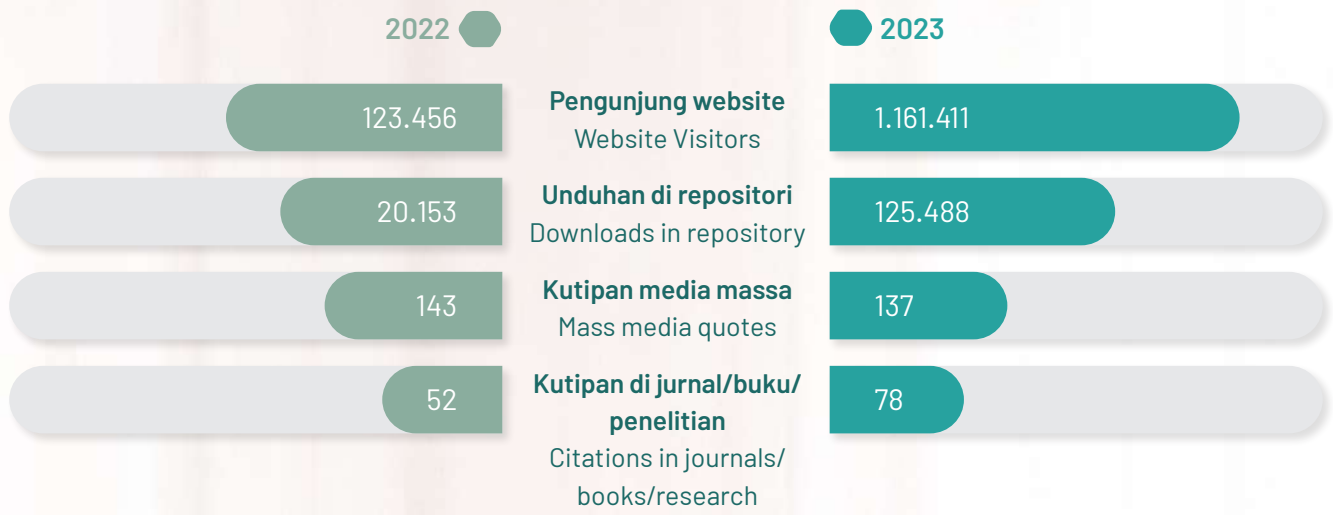




## » 1. Unduhan dan kutipan Downloads and quotes

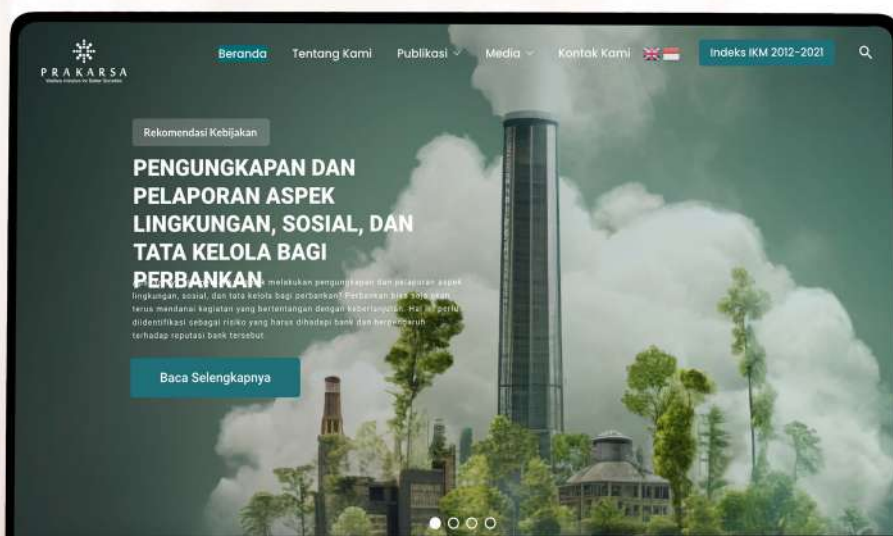
Sepanjang tahun 2023, The PRAKARSA mengalami peningkatan sebagai rujukan. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah indikator seperti unduhan atas produk-produk yang telah dihasilkan oleh The PRAKARSA, kutipan di media masa dan kutipan di sejumlah jurnal, buku atau penelitian.

Throughout 2023, The PRAKARSA witnessed a notable increase in referrals, as evidenced by various indicators such as downloads of its produced materials, mentions in mass media, and citations in a number of journals, books, and research papers.



\*kutipan di jurnal/buku/penelitian hanya bersumber dari google scholar, sehingga jumlahnya mungkin lebih dari yang tercatat dalam laporan ini.

\*Citations in journals/books/research are only sourced from Google Scholar, it is a possibility that the real number is more than what is recorded in this report.



## Publikasi yang Paling Banyak Diunduh Most Downloaded Publications

Pada tahun 2023, kami telah melakukan peremajaan tampilan website. Hal ini ternyata cukup berpengaruh signifikan pada peningkatan jumlah unduhan publikasi The PRAKARSA.

In 2023, we revamped the appearance of our website, which had a notable impact on increasing the number of downloads of The PRAKARSA publications.



Publikasi yang paling banyak diunduh antara lain Laporan Penelitian Global Value Chain, Buku Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan; Menjinakkan Meta kuasa Global; Suara Indonesia untuk Globalisasi yang Lebih Adil; Mimpi Negara Kesejahteraan, Laporan Penelitian Aliran Keuangan Gelap dan Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital.

Kemudian, jika dilihat dari pemberitaan media, lebih dari setengah pemberitaan di media masa yang mengangkat pemberitaan The PRAKARSA seputar Civil 20. The PRAKARSA mendapatkan perhatian yang cukup banyak mengenai isu perpajakan seperti potensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap pada komoditas batu bara dan perikanan, reformasi kebijakan perpajakan yang lebih adil di ASEAN, pajak kekayaan dan bisnis yang inklusif.

Among the most downloaded publications were the Global Value Chain Research Report, the book Breaking New Social Policy Directions in Indonesia: More Than Just Poverty Reduction; Taming Global Meta power; Indonesian Voice for Fairer Globalization; The Dream of a Welfare State, Illicit Financial Flows Research Report and Digital Financial Products Smart Consumer Handbook.

Media reports in 2023 showcased The PRAKARSA's significant presence, with over half of the coverage focusing on its involvement in Civil 20. The organization garnered considerable attention regarding tax revenue losses due to illicit financial flows in coal and fisheries commodities, reform initiatives for fairer tax policies within ASEAN, and discussions on inclusive wealth and business taxes.





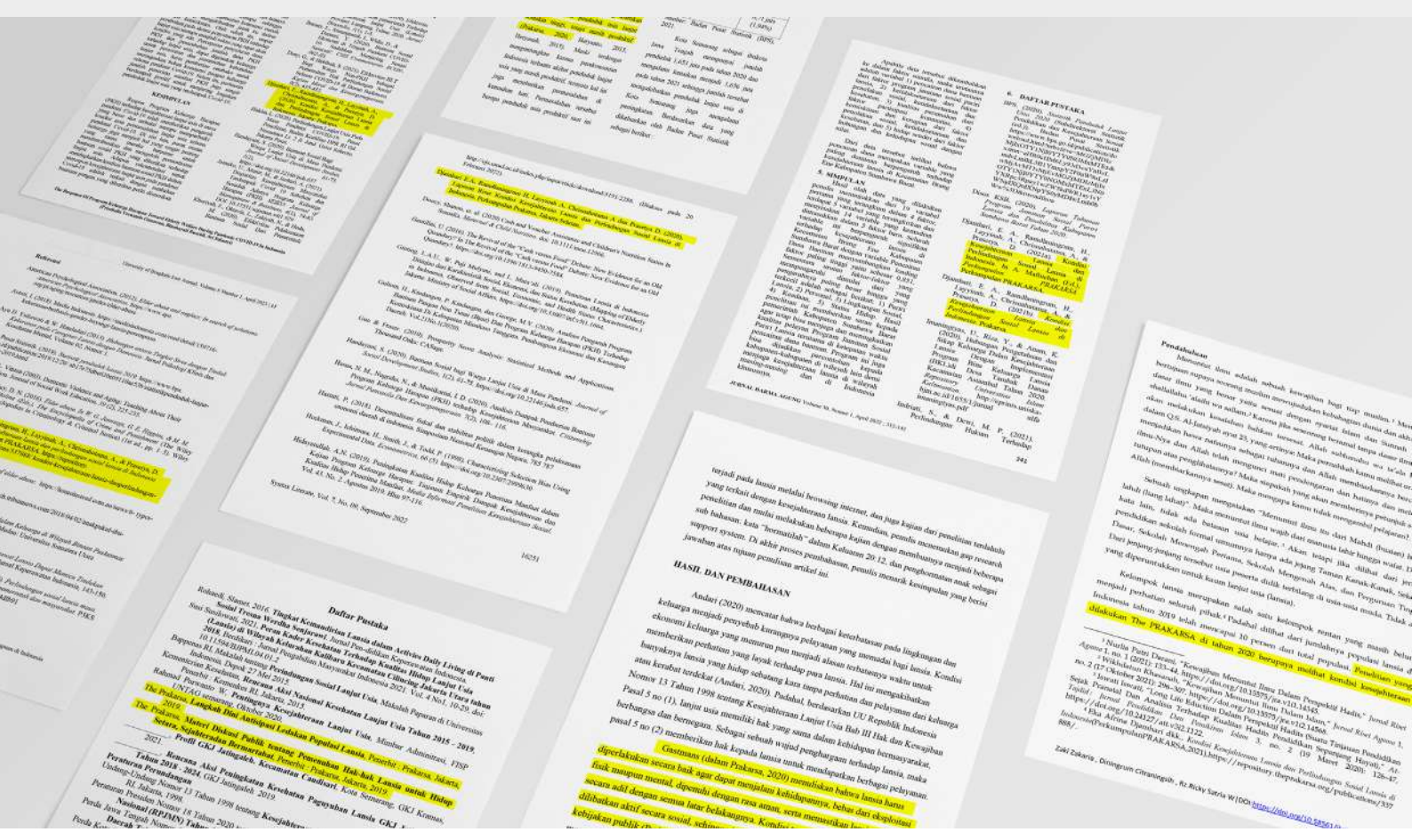
Aspek perpajakan merupakan salah satu dari tiga pilar strategis yang diusung Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi di kawasan ASEAN. Pajak kekayaan dapat menjadi instrumen yang tepat untuk keadilan pajak dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan yang terus melebar. Selain itu, pajak kekayaan juga dapat berkontribusi untuk menambah pendapatan negara dan mendorong kemandirian ekonomi.

Pajak kekayaan yang diusung oleh The PRAKARSA adalah pengungutan pajak kekayaan terhadap kekayaan bersih, pemindahan kekayaan, dan wealth dari apresiasi yang dihasilkan dari keuntungan modal (capital gains). Pungutan pajak kekayaan dikenakan kepada high net worth individual (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas US\$1 juta atau setara Rp140 miliar. Hanya saja, penerapan pajak kekayaan juga perlu didukung oleh perbaikan kebijakan perpajakan negara-negara lainnya di ASEAN. Hanya saja, penerapan pajak kekayaan juga perlu didukung oleh perbaikan kebijakan perpajakan negara-negara lainnya di ASEAN.

Taxation stands as one of the three strategic pillars advocated by Indonesia to foster economic recovery within the ASEAN region. Implementing a wealth tax could serve as an effective instrument for tax justice and reducing welfare inequality. Additionally, such have the potential to bolster state revenue and foster economic independence.

The wealth tax advocated by The PRAKARSA encompasses levies on various aspects of wealth, transfer of wealth, and wealth from appreciation resulting from capital gains. Wealth tax levies are imposed on high-net-worth individuals (HNWI) who have a net worth above US\$1 million or the equivalent of IDR 140 billion. However, the implementation of a wealth tax also hinges on improvements in the taxation policies of other ASEAN countries. Collaboration and alignment of tax policies among ASEAN nations are vital to ensure the effectiveness and fairness of wealth taxation initiatives.

Kutipan PRAKARSA dalam berbagai jurnal PRAKARSA citations in various journals





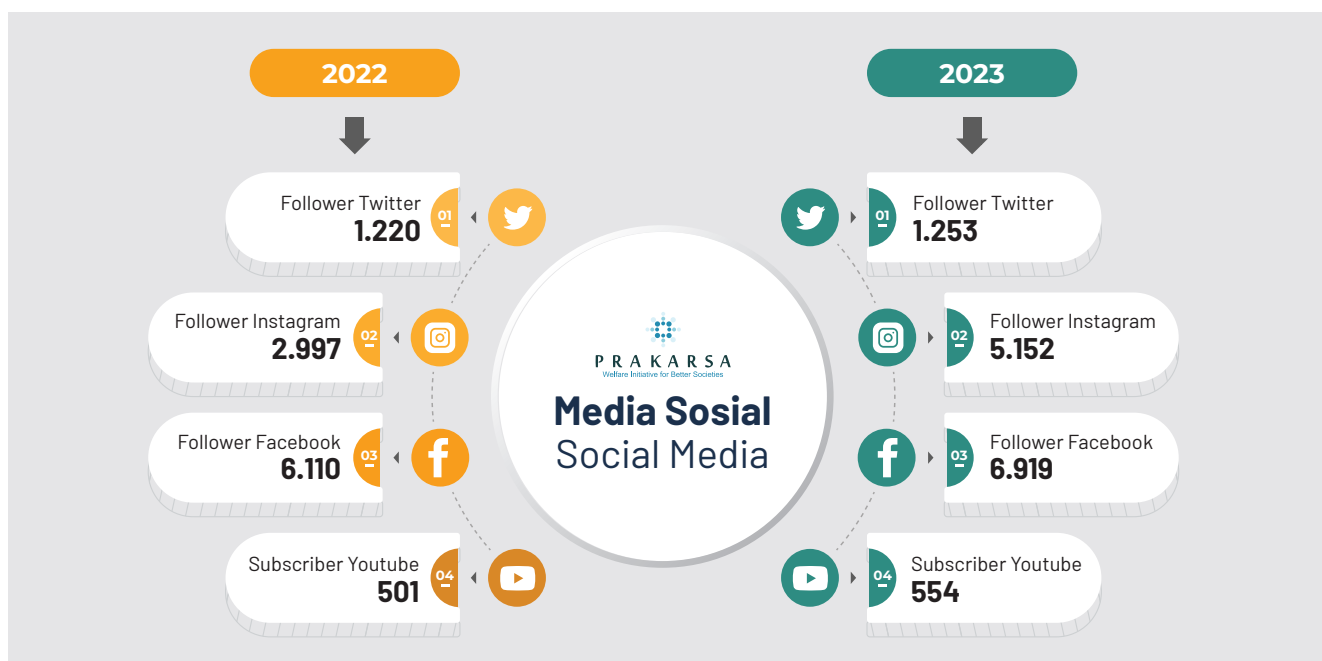
Selain itu, The PRAKARSA juga banyak dikutip dalam berbagai jurnal. Laporan penelitian yang berjudul Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia adalah yang paling banyak dikutip oleh publik. Isu kesejahteraan lansia diangkat oleh The PRAKARSA karena memang merupakan isu penting di kebijakan sosial. Isu ini penting karena belum banyak organisasi yang menaruh perhatian pada isu kelanjutusiaan.

Additionally, The PRAKARSA receives widespread citations in various academic journals. The research report entitled “Conditions of Elderly Welfare and Social Protection of the Elderly in Indonesia” stands out as the most referenced by the public. The organization prioritized addressing the issue of elderly welfare due to its significance social policy. This focus as few organizations have directed attention toward to ageing-related issues underscoring the importance of The PRAKARSA’s contributions in this area.

## » 2. Kampanye Sosial Media Social Media Campaign

Kampanye di media sosial juga merupakan salah satu strategi komunikasi yang kami lakukan. The PRAKARSA menggunakan komunikasi melalui sosial media untuk lebih mendekatkan diri kepada publik dan menyampaikan informasi atas perbaikan kebijakan atau respon atas suatu isu. Penyadaran berbasis bukti juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik, sehingga perbaikan atau perubahan kebijakan dapat diakselerasi. Kampanye media, kegiatan atau kemitraan dengan media telah berdampak pada peningkatan jumlah jangkauan kampanye publik yang dilakukan oleh The PRAKARSA. Hal ini didukung oleh pertumbuhan jumlah pengikut di berbagai platform media sosial sepanjang tahun, seperti berikut:

Campaigns on social media serve as a vital communication strategy for The PRAKARSA. Leveraging social media channels allows the organization to engage closely with the public and convey information on policy improvements or responses to pertinent issue. Employing evidence-based messaging aids in garnering public support, expediting improvements or policy changes. Media campaigns, activities, or partnerships further contribute to expanding the reach of The PRAKARSA’s public outreach efforts. This is evidenced by the growth in the number of followers on various social media platforms throughout the year, including the following:





| 06

# Penutup

## Closing

**Tahun 2023 merupakan landasan bagi keberlanjutan organisasi, dengan berbagai upaya seperti pengembangan unit bisnis, penguatan branding, dan peningkatan sumber daya.**

2023 is the foundation for organisational sustainability, with various efforts such as business units' development, branding reinforcement, and resources augmentation.



## » 1. Ringkasan pencapaian utama Summary of key achievements



**The PRAKARSA secara konsisten terus berupaya menjadi lembaga think-tank yang berpengaruh terhadap kebijakan publik di tingkat nasional, regional dan internasional.**

The PRAKARSA remains steadfast in its pursuit of becoming a prominent think tank capable of influencing public policy at the national, regional and international levels.

Hal ini terlihat dari kepemimpinan kami dalam berbagai forum seperti GATJ, TAFJA, C20, dan ASEAN Chairmanship. Kami juga terus berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) agar peran dan kontribusi OMS dalam penguatan reformasi kebijakan terwujud dengan partisipasi yang bermakna. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan pemerintah dalam perumusan berbagai kebijakan publik yang lebih baik dan berkualitas. Bukan hanya dari sisi eksternal, pengembangan internal organisasi juga terus diupayakan mulai dari pengembangan infrastruktur fisik, SDM hingga dukungan kebijakan. Tahun 2023 merupakan landasan bagi keberlanjutan organisasi, dengan berbagai upaya seperti pengembangan unit bisnis, penguatan branding, dan peningkatan sumber daya.

Our leadership roles in various forums such as GATJ, TAFJA, C20, and ASEAN Chairmanship reflect our commitment to this mission. We actively collaborate with civil society organisations (CSOs) so that the role and contribution of CSOs in strengthening policy reform to ensure meaningful participation in policy reform, leading to the formulation of higher-quality public policies with government involvement. Furthermore, internal organizational development remains a priority, encompassing the enhancement of physical infrastructure, investment in human resources, and policy support. 2023 is the foundation for organisational sustainability, with various efforts such as business units' development, branding reinforcement, and resources augmentation. These collective efforts aim to fortify The PRAKARSA's position as a driving force in shaping progressive and impactful policies.



## » 2. Tantangan Challenge



### Aspek pendanaan Funding aspect

Sepanjang tahun 2023, The PRAKARSA menemui sejumlah tantangan pada aspek pendanaan. Tantangan untuk mendapatkan proyek multi-year juga kami hadapi, sementara di lain sisi kami harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan program berdampak maksimal dalam waktu singkat. Tantangan ini juga tidak terlepas dari penurunan tren pendanaan untuk isu-isu sosial dan kebijakan fiskal. Akibatnya mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mendukung program-program yang berfokus pada masalah-masalah ini, serta mengurangi dampak yang dapat dihasilkan untuk masyarakat. Skema pendanaan yang menguat pada tema perubahan iklim, transisi energi, dan lingkungan menawarkan peluang baru bagi organisasi untuk memperluas dampak mereka dalam bidang-bidang ini. Namun, di sisi lainnya organisasi harus mampu menyesuaikan strategi program, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk isu-isu tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi yang komprehensif, termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien, penyesuaian program-program yang ada dengan tren pendanaan, serta eksplorasi peluang baru dalam tema-tema pendanaan yang berkembang.

Throughout 2023, The PRAKARSA encountered a number of challenges in the funding, including in securing multi-year projects while to optimize resources for maximum impact within tight timeframe. These challenges coincide with a downward trend in funding for social issues and fiscal policy, impacting the organisation's capacity to support programs addressing these critical areas and diminishing their societal impact. However, the evolving landscape presents new opportunities in strengthened funding schemes related to themes of climate change, energy transition and the environment. However, organisations must adapt their program strategies, skills, and resources to address these emerging issues. Therefore, to navigate these challenges, organisation need to develop comprehensive strategies. These strategies should encompass efficient resource management, adaptation of existing programs to funding trends, and exploration of new opportunities in emerging thematic areas to ensure continued impact and sustainability.





### Aspek kelembagaan Institutional aspects

The PRAKARSA juga menghadapi tantangan sebagai lembaga yang berada dalam posisi 'middle income trap'. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah mencapai tingkat pendapatan yang relatif tinggi, namun belum berhasil melampaui tahap itu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pengembangan ekonomi organisasi. Tantangan ini mungkin meliputi kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi staf. Dalam menghadapi tantangan ini, The PRAKARSA perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam manajemen dana, pengelolaan portofolio proyek, serta memperkuat kapasitas organisasi dan jaringan kemitraannya untuk meningkatkan kemampuan dalam memenangkan proyek-proyek baru dan mengatasi middle income trap.

The PRAKARSA also confronts challenges associated with being ensnared in a 'middle-income trap' position. This predicament indicates that while the organization has attained a relatively high level of income, it struggles to transcend this stage and achieve further economic development. These challenges encompass difficulties in augmenting economic growth, enhancing the quality of work output, and ensuring sustainable well-being for staff. To address these challenges, The PRAKARSA must devise a more effective strategy for fund management and project portfolio management. Additionally, efforts should be directed towards bolstering organizational capacity and expanding partnership networks to enhance the organization's ability to secure new projects and surmount the middle-income trap. Through these measures, The PRAKARSA can navigate this challenging terrain and advance towards sustained economic growth and development.

### Pengembangan Unit Bisnis Business Unit Development

Pada proses pengembangan unit bisnis, The PRAKARSA harus menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga konsultan yang sudah eksistensi terlebih dahulu di pasar. Selain itu aspek sumber daya manusia dan aspek legalitas menjadi tantangan penting yang perlu diatasi segera oleh unit bisnis The PRAKARSA.

In the business unit development process, The PRAKARSA must contend with competition from existing companies and consultancy institutions in the market. Additionally, human resource and legal aspects are important challenges that need to be addressed promptly by The PRAKARSA business unit.



**Tahun 2023 adalah tahun yang penuh peluang dan tantangan, tapi sebagai organisasi yang terus tumbuh kami mampu melaluinya. Kami belajar bahwa kami perlu terus bersiap menghadapi tantangan yang tidak terduga. Kami yakin kami berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, konsisten dan bertanggung jawab.**

In 2023, we encountered a myriad of opportunities and challenges, yet as an organisation committed to growth, we successfully navigated through them. We've gleaned the importance of continuously preparing for unforeseen challenges. With confidence, we affirm that we're steering towards fostering robust, consistent and responsible growth.

Menutup laporan ini, Direktur Eksekutif The PRAKARSA mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jaringan, mitra, donor, dan berbagai pemangku kepentingan atas dukungannya. Semoga kita semua menjadi lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

As we conclude this report, the Executive Director of The PRAKARSA extends heartfelt gratitude to all staff for their dedication and hard work. We also extend our sincere appreciation to our networks, partners, donors and various stakeholders for their support. Together, we aspire to contribute to the prosperity of Indonesia, and we trust that with collective effort, we will achieve this goal.





## PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)

    The PRAKARSA

 PRAKARSA Podcast

**Follow us:**   Perkumpulan PRAKARSA   The PRAKARSA



[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)